



PT JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2025

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Memperkuat Peran Penjaminan dalam
Mendukung **UMKM** dan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah



**PENJAMINAN KUAT
USAHA BERKEMBANG
JABAR MAJU**



Kolaboratif



Integritas



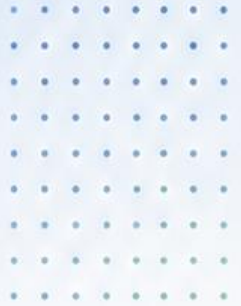
Profesional



Berkelanjutan

KATA PENGANTAR

— ● —
PREFACE



TENTANG LAPORAN TAHUNAN

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang penjaminan, dengan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKM). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah dalam memperkuat sektor riil dan meningkatkan inklusi keuangan di Jawa Barat. Peran Lembaga Penjamin seperti PT Jamkrida Jabar (Perseroda) saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan UMKM secara nasional. Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar.

Dalam menjalankan perannya, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi juga mengemban fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Dukungan perusahaan terhadap sektor produktif diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah.

Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi dan manajemen atas kinerja perusahaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan ini menyajikan informasi yang komprehensif mengenai profil perusahaan, kinerja operasional dan keuangan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta berbagai kebijakan dan langkah strategis yang ditempuh sepanjang tahun berjalan.

Perusahaan juga terus mendorong peningkatan komposisi penjaminan pada sektor produktif sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan regulator, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada UMKMK. Berbagai inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan dilakukan guna menjawab kebutuhan mitra kerja dan pemangku kepentingan yang semakin berkembang.

Selain fokus pada pertumbuhan usaha, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi operasional, serta keberlanjutan kinerja keuangan. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan dapat terus menjaga tingkat kesehatan dan daya saing di industri penjaminan.

Sepanjang tahun 2025, berbagai capaian dan tantangan telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan para pemegang saham, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran berharga dalam memperkuat fondasi bisnis perusahaan ke depan.

Melalui Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 ini, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kinerja perusahaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan di masa mendatang. Perusahaan optimis dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun 2025 berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS PT Jamkrida Jabar



Muhammad Iskandar
Komisaris Utama Independen

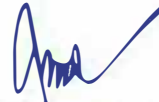


Yogi Gautama Jaelani
Komisaris

DIREKSI PT Jamkrida Jabar



Bobby Cahyadi
Direktur Utama



Muji Rahmand
Direktur Keuangan

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI	
I. IKHTISAR KINERJA	01
II. LAPORAN MANAJEMEN	15
III. PROFIL PERUSAHAAN	29
IV. TATA KELOLA PERUSAHAAN	49
V. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	75
VI. LAPORAN AUDIT	91
VII. LAMPIRAN	105

Daftar Isi

i	KATA PENGANTAR	41	KINERJA PERSEROAN
ii	Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025	41	Tinjauan Ekonomi
iii	DAFTAR ISI	42	Tinjauan Prospek Masa Depan
1	IKHTISAR KINERJA	43	Tinjauan Bisnis
1	Ikhtisar Kinerja Operasional	45	Tinjauan Keuangan
3	Ikhtisar Kinerja Keuangan	48	Tinjauan Operasional
5	Peristiwa dan Kinerja Penting	48	Aspek Penjaminan
8	Tingkat Kesehatan keuangan	52	Aspek Manajemen Risiko
3	LAPORAN MANAJEMEN	54	Aspek Klaim dan Subrogasi
9	Laporan Dewan Komisaris	56	Aspek Sumber Daya Manusia
15	Laporan Dewan Pengawas Syariah	60	Aspek Umum
6	PROFIL PERUSAHAAN	61	Aspek Sistem Manajemen Informasi
19	Sekilas Jamkrida Jabar	62	Aspek Pengawasan
20	Legalitas Usaha	64	Unit Usaha Syariah
22	Visi dan Misi	70	TATA KELOLA PERSEROAN
23	Nilai-Nilai Perusahaan	70	Komitmen Penerapan GCG
24	Produk dan Layanan	70	Tujuan Penerapan GCG
25	Informasi Modal dan Pemegang saham	70	Dasar Penerapan GCG
27	Profil Dewan Komisaris	71	Struktur dan Mekanisme GCG
31	Profil Dewan Pengawas Syariah	72	Rapat Umum Pemegang Saham
35	Profil Direksi	72	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
39	Data Demografi Sumber Daya Manusia	74	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
40	Struktur Organisasi	75	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
		77	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

80	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	103	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain
82	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris	104	LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
93	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi	105	LAPORAN AUDIT
96	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal	106	Surat Pernyataan Direksi
102	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi	108	Laporan Auditor Independen
		111	Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024-2025



PT JAMKRIDA JABAR
SOLUSI UMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

LAPORAN TAHUNAN | **2025**
ANNUAL REPORT

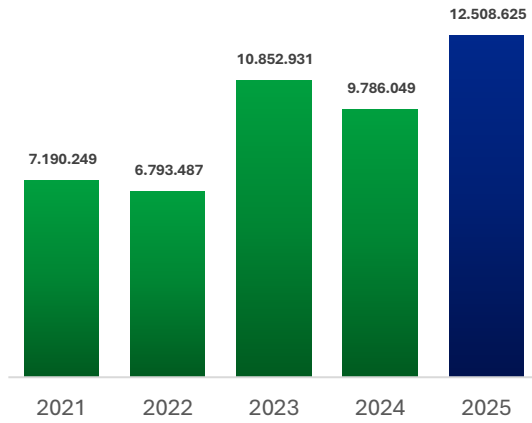
IKHTISAR KINERJA 2025



IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

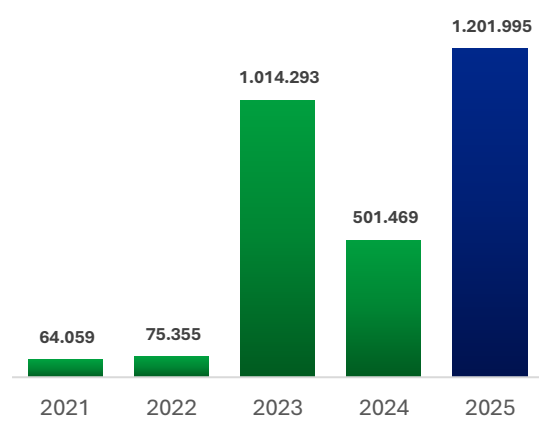
Volume Penjaminan

dalam jutaan rupiah



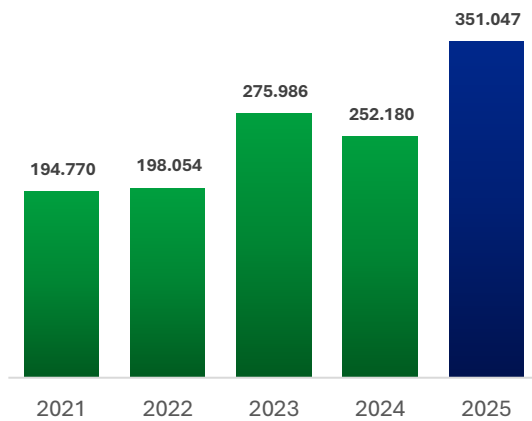
KUMKM Terjamin

dalam satuan unit/orang



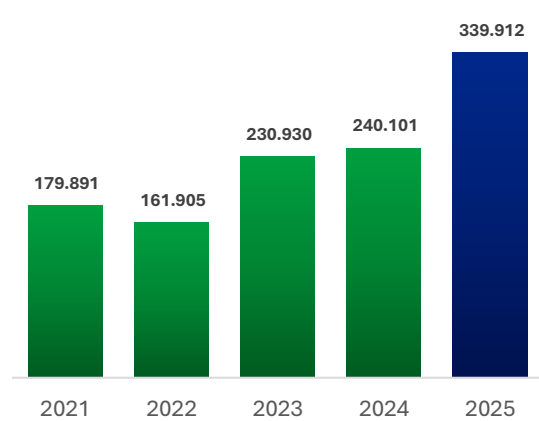
Imbal Jasa Penjaminan Cash Basis

dalam jutaan rupiah



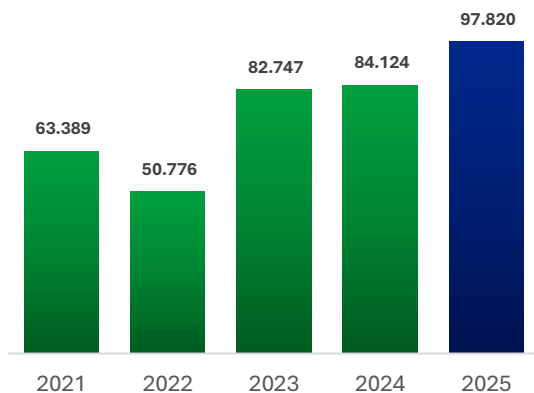
Imbal Jasa Penjaminan Accrual Basis

dalam jutaan rupiah
termasuk Restitusi IJP



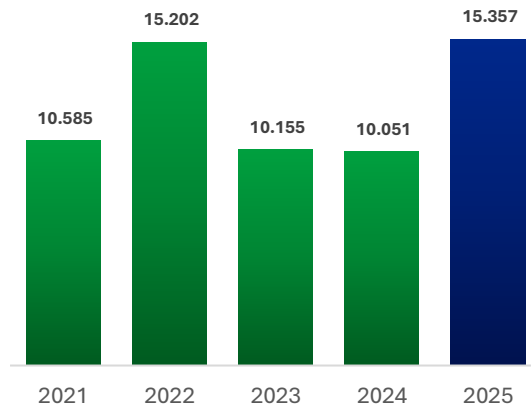
Beban Klaim

dalam jutaan rupiah



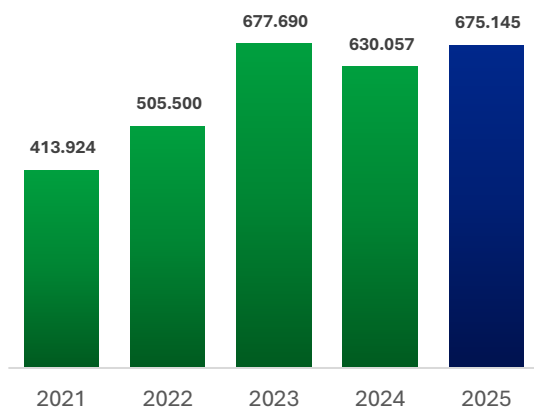
Laba (Rugi) Tahun Berjalan

dalam jutaan rupiah



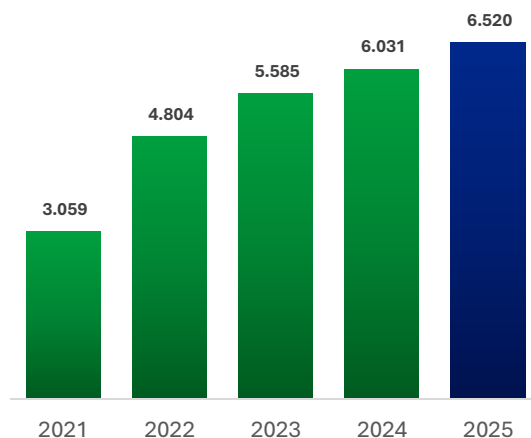
Jumlah Aset

dalam jutaan rupiah



Dividen

dalam jutaan rupiah



*Dividen 2025 belum ditetapkan pada RUPS Tahunan

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	157.059,29	157.881,62	181.636,94	115,05%	15,65%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(193,02)	(842,94)	(425,84)	50,52%	120,61%
Surat Berharga	109.766,72	191.176,93	168.806,46	88,30%	53,79%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	(555,50)	-	0,00%	-100,00%
Piutang Re/Cogaranasi	186.042,38	177.656,80	164.102,54	92,37%	-11,79%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(6.982,18)	(3.513,32)	(6.664,01)	189,68%	-4,56%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10.178,55	8.052,97	9.393,28	116,64%	-7,72%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(194,52)	(206,74)	(48,67)	23,54%	-74,98%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	31.966,62	38.949,38	32.884,68	84,43%	2,87%
Piutang Lain-Lain	685,31	4.161,90	3.931,88	94,47%	473,74%
Properti Investasi	2.626,97	2.626,97	2.580,30	98,22%	-1,78%
JUMLAH ASET LANCAR	490.956,11	575.388,07	556.197,57	96,66%	13,29%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	105.100,75	106.847,48	84.737,44	79,31%	-19,38%
Aset Tetap - Bersih	12.562,55	13.598,16	12.528,14	92,13%	-0,27%
Aset Pajak Tangguhan	5.937,96	-	5.236,80	0,00%	-11,81%
Piutang Estimasian	14.527,97	-	14.977,02	-	-
Aset Lain-Lain	971,26	2.643,48	1.467,63	55,52%	51,11%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	139.100,50	123.089,12	118.947,03	96,63%	-14,49%
JUMLAH ASET	630.056,61	698.477,19	675.144,60	96,66%	7,16%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	408,84	3.782,37	2.506,38	66,26%	513,04%
Utang Re/Cogaranasi	43.362,80	40.175,45	41.720,44	103,85%	-3,79%
Utang Klaim	-	-	1.411,65	0,00%	0,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.955,71	1.213,45	7.976,72	657,36%	60,96%
Penampungan Sementara	11.862,54	12.654,84	14.142,28	111,75%	19,22%
Utang Lancar Lainnya	23,92	1.125,79	108,86	9,67%	355,15%
Liabilitas Penjaminan Lainnya	2.674,62	-	15.622,37	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	57.870,93	71.854,04	62.083,82	86,40%	7,28%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	121.159,36	130.805,94	145.572,51	111,29%	20,15%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	158.313,20	175.683,17	163.681,48	93,17%	3,39%
Cadangan Klaim	25.435,09	34.121,25	27.359,17	80,18%	7,56%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3.195,68	3.854,08	3.273,32	84,93%	2,43%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	186.943,97	213.658,50	194.313,97	90,95%	3,94%
JUMLAH LIABILITAS	308.103,33	344.464,44	339.886,47	98,67%	10,32%
EKUITAS					
Modal	260.280,00	287.369,12	260.280,00	90,57%	0,00%
Cadangan Umum	53.750,04	55.515,27	57.268,01	103,16%	6,55%
Saldo Laba	10.051,34	9.925,35	15.356,81	154,72%	52,78%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(1.667,52)	1.486,04	2.873,59	193,37%	-272,33%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(460,58)	(283,03)	(520,28)	183,83%	12,96%
JUMLAH EKUITAS	321.953,27	354.012,75	335.258,12	94,70%	4,13%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	630.056,61	698.477,19	675.144,60	96,66%	7,16%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	245.378,15	261.537,23	342.505,53	130,96%	39,58%
Beban Akuisisi	(33.634,66)	(27.641,66)	(34.928,49)	126,36%	3,85%
Restitusi IJP	(5.276,93)	(4.872,16)	(2.593,41)	53,23%	-50,85%
Manajemen Fee	27.182,43	18.236,83	33.544,84	183,94%	23,41%
Beban Regaransi	(129.789,68)	(87.545,26)	(210.900,68)	240,90%	62,49%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	103.859,31	159.714,98	127.627,80	79,91%	22,89%
KLAIM					
Beban Klaim	(84.124,25)	(110.021,63)	(97.819,72)	88,91%	16,28%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	(2.802,86)	(6.589,68)	(1.475,03)	22,38%	-47,37%
JUMLAH KLAIM	(86.927,11)	(116.611,31)	(99.294,75)	85,15%	14,23%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	16.932,20	43.103,67	28.333,05	65,73%	67,33%
PENDAPATAN INVESTASI	16.162,89	13.458,25	20.038,01	148,89%	23,98%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.327,19	6.696,45	5.754,28	85,93%	72,95%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	6.902,08	3.590,36	71,82	2,00%	-98,96%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(6.776,87)	(8.594,47)	(5.032,65)	58,56%	-25,74%
Beban Sumber Daya Manusia	(20.972,85)	(30.655,67)	(24.537,56)	80,04%	17,00%
Beban Administrasi & Umum	(7.470,82)	(11.497,00)	(7.670,12)	66,71%	2,67%
JUMLAH BEBAN USAHA	(35.220,54)	(50.747,13)	(37.240,33)	73,38%	5,73%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	8.103,82	16.101,59	16.956,82	105,31%	109,24%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	(6.176,24)	(1.683,38)	27,26%	0,00%
Manfaat Pajak Tangguhan	1.947,51	-	83,37	0,00%	-95,72%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.947,51	(6.176,24)	(1.600,01)	25,91%	-182,16%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10.051,34	9.925,35	15.356,81	154,72%	52,78%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(1.867,92)	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	8.183,41	9.925,35	15.356,81	154,72%	87,66%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERISTIWA DAN KEJADIAN PENTING 2025



04 Februari 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat



05 Maret 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Pembiayaan BSI Distributor Financing antara PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk



05 Juni 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Tahun Buku 2024





15 September 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan PT Igna Asia Reinsurance Broker



03 Oktober 2025

Peringatan HUT ke 13 PT Jamkrida Jabar (Perseroda)



06 Oktober 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan PMI antara PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan PT BPRS HIK MCI (06/10/2025);



23 Oktober 2025

Penandatanganan NDA antara PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan Indonesian Research Institute Japan



06 November 2025

Penandatanganan Kerja Sama antara Bank Sulteng-Pakar-Asuransi/Penjaminan



14 November 2025

Inklusi Keuangan PT Jamkrida Jabar Tahun 2025 PT Jamkrida Jabar (Perseroda)



24 November 2025

RUPS-LB PT Jamkrida Jabar Tahun 2025



30 Desember 2025

Menghadiri dan Menerima Penghargaan pada Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, berikut hasil penilaian tingkat Kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) per 31 Desember 2025:

INDIKATOR	STANDAR SANGAT SEHAT	2024	RKAP 2025	2025
Rasio Likuiditas	130% s/d < 800%	417,21%	439,88%	382,08%
Gearing Ratio	4 s/d < 28	29,21 Kali	35,43 Kali	27,35 Kali
Rasio Rentabilitas				
a. Return On Asset	≥ 5%	1,68%	2,61%	2,51%
b. BOPO	< 85%	102,58%	96,64%	88,99%
c. Rasio Klaim Terhadap Pendapatan IJP	< 70%	83,70%	73,01%	63,49%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
TOTAL NILAI KOMPOSIT	1 s/d 1,80	2,40	2,40	1,35
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN	Sangat Sehat	Sehat	Sehat	Sangat Sehat



PT JAMKRIDA JABAR
SOLUSI UMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

LAPORAN TAHUNAN | **2025**
ANNUAL REPORT

LAPORAN MANAJEMEN 2025



Laporan Dewan Komisaris



Muhammad Iskandar
Komisaris Utama Independen

Yogi Gautama Jaelani
Komisaris

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya, sehingga PT Jamkrida Jabar (Persero) mampu melewati tahun buku 2025 dengan ketangguhan dan pencapaian yang membanggakan. Di tengah dinamika ekonomi makro dan tantangan di sektor industri keuangan non-bank, Perusahaan tetap konsisten menjalankan perannya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan penjaminan yang inovatif dan terpercaya.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Persero) menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagai pertanggung-jawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris bersama Komite dibawah Dewan Komisaris secara periodik, telah menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi untuk tetap berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas *internal control* dalam setiap aktivitas Perseroan, termasuk pada konsistensi pencapaian target RKAP Tahun 2025, implementasi strategi Perseroan, dan prospek usaha yang disusun Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Direksi dalam mengelola tantangan yang ada hingga akhirnya mampu membukukan kinerja Perusahaan yang baik.

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas kinerja operasional dan keuangan serta tingkat kesehatan Perseroan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris tentunya menyadari dalam kondisi demikian target RKAP tahun 2025 tidaklah mudah untuk diraih. Namun demikian terdapat beberapa indikator operasional masih menunjukkan hasil yang baik.

ASPEK KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Di tahun 2025, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp15,35 miliar. Realisasi tersebut mencapai 154,72% dari target RKAP dan didukung oleh pencapaian pendapatan penjaminan 79,91% dari RKAP dan beban usaha sebesar 73,38% dari RKAP. Sedangkan pencapaian pendapatan investasi dan pencapaian subrogasi, masing masing tercapai 148,89% dan 85,93%. Selain itu realisasi beban klaim neto mencapai 85,15% dari target RKAP.

Dibandingkan dengan tahun 2024, pencapaian laba bersih Perseroan meningkat sebesar 52,78%. Peningkatan Laba tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah Pendapatan Penjaminan, yaitu sebesar 22,89% dari tahun sebelumnya, Pendapatan Investasi sebesar 23,89%, dan Pendapatan Subrogasi sebesar 72,95%, dan berhasil melakukan pengendalian biaya & efisiensi beban usaha dari tahun sebelumnya.

Total Aset Perseroan meningkat sebesar 7,16% dibanding tahun 2024, menjadi Rp675,14 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Piutang Lain-Lain. Sedangkan komposisi Total Aset pada bulan Desember 2025 ini adalah 82,49% Aset Lancar dan 17,51% Aset Tidak Lancar. Perusahaan dalam kondisi yang sangat likuid. Namun demikian, Perusahaan masih memiliki piutang Re/Cogaransi yang cukup besar, yaitu mencapai 29,50% dari Aset Lancar. Manajemen perlu melakukan penanganan dan penyelesaian piutang dengan menyusun rencana pengelolaan dan penyelesaiannya.

Liabilitas juga meningkat 10% karena peningkatan beban yang masih harus di bayar (naik 61%), penampungan sementara (naik 19%), dan liabilitas penjaminan lainnya (naik 484%). Ekuitas juga meningkat 4% karena peningkatan cadangan umum dan saldo laba. Secara keseluruhan, Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Perusahaan adalah Sangat Sehat, sesuai kriteria OJK.

ASPEK KINERJA NON KEUANGAN

ASPEK PENGEMBANGAN USAHA

Dewan komisaris menilai bahwa Perseroan telah melakukan beberapa upaya untuk memperluas pasar Penjaminan dan mengembangkan usaha Penjaminan, serta meningkatkan jumlah penjaminan kredit Produktif. Perseroan telah berhasil meningkatkan komposisi jumlah penjaminan kredit produktif menjadi lebih dari 25% sebagaimana yang di persyaratkan dalam POJK.

ASPEK PENGEMBANGAN SDM

Produktivitas SDM yang diukur dengan laba per karyawan di tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu sebesar 50,4% dari tahun 2024. Dewan Komisaris menilai pengembangan SDM telah berjalan positif melalui program peningkatan kompetensi yang mendukung kebutuhan bisnis Perseroan.

Dewan Komisaris menilai Perseroan masih perlu melakukan penguatan Proses Bisnis dan organisasi sesuai SOTK agar tetap selaras dengan pertumbuhan usaha. Manajemen juga perlu memastikan proses rekrutmen diarahkan pada fungsi-fungsi utama sesuai prinsip *the right person on the right place at the right time*, serta mendorong implementasi sistem kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI) secara konsisten agar kinerja SDM lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan.

ASPEK PENGAWASAN INTERNAL

Dewan Komisaris menilai Perseroan masih perlu untuk meningkatkan sistem pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) dan melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sistem pengendalian sehingga dapat terus menjaga efektivitas operasional dan tata kelola Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris senantiasa memberikan dukungan penuh kepada Direksi untuk mewujudkan target dan prospek usaha yang telah disusun serta menjadi mitra strategis manajemen untuk tercapainya rencana kerja tersebut.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam mengelola Perseroan dengan memberikan masukan kepada Direksi dalam mengambil keputusan-keputusan agar dapat dieksekusi

secara efektif bagi kepentingan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya. Secara rutin, Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan Direksi untuk memantau perkembangan terbaru kondisi ekonomi, kesehatan, dan industri terhadap operasional dan kinerja Perseroan.

ASPEK GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE (GRC)

Dewan Komisaris berkomitmen penuh dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG - Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Kami secara rutin mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di Perseroan perlu diperkuat melalui kelengkapan SOP, penyusunan risk register, dan pengawasan kepatuhan oleh fungsi compliance. Perseroan juga perlu segera menerapkan Enterprise Risk Management secara menyeluruh di seluruh lini untuk memperkuat pengelolaan risiko dan memastikan integrasi *Governance, Risk, and Compliance* secara efektif.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan Direksi menjalankan strategi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kami melakukan evaluasi rutin melalui rapat berkala, baik internal maupun bersama Direksi, dengan fokus utama pada:

- **Ketahanan Permodalan:** Memastikan rasio gearing dan likuiditas tetap berada pada level yang aman untuk mendukung ekspansi bisnis.
- **Kualitas Penjaminan:** Mendorong penguatan analisis risiko dalam setiap keputusan penjaminan guna menjaga rasio klaim tetap terkendali.
- **Transformasi Digital:** Mendukung percepatan sistem integrasi dengan mitra perbankan dan penerima jaminan untuk efisiensi operasional

Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerja sama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris akan terus membangun hubungan kerja yang efektif dan harmonis bersama Direksi agar pengelolaan Perseroan senantiasa berjalan sesuai harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

SARAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2025

- a. Manajemen harus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan IJP yang berasal dari kredit produktif, yang selama ini banyak ditopang oleh kredit non produktif, pendapatan bisnis penjaminan dan melakukan efisiensi biaya yang berkelanjutan;
- b. Manajemen perlu segera menerapkan program efisiensi yang lebih agresif, diukur secara kuantitatif, dan dimonitor setidaknya setiap bulan;
- c. Manajemen perlu menyusun rencana pengelolaan dan penyelesaian piutang serta membuat laporan perbulan, agar diketahui upaya penanganan dan penyelesaiannya termasuk upaya hukum;
- d. Manajemen perlu melakukan perbaikan kerja sama mitra Bank dan Reasuransi dengan menerapkan prinsip tata kelola, mitigasi risiko dan kepatuhan yang baik;
- e. Manajemen perlu menyusun strategi dan meningkatkan pendapatan investasi;

- f. Manajemen perlu melakukan langkah-langkah lebih agresif dalam hal penanganan subrogasi dengan membuat satu unit baru sesuai dengan rencana SOTK yang telah disepakati pada RUPS, agar target pencapaian pendapatan Subrogasi dapat tercapai;
- g. Manajemen perlu menyusun strategi dan menyelesaikan Klaim Dalam Proses;
- h. Manajemen perlu menyusun *talent mapping* dan perencanaan suksesi berdasarkan *roadmap* bisnis perseroan;
- i. Manajemen perlu mengukur dampak dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan;
- j. Manajemen perlu menyusun KPI sampai pada level individu agar kinerja SDM lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan;
- k. Manajemen perlu mengimplementasikan *Enterprise Risk Management (ERM)* dan memantau pelaksanaan ERM secara berkesinambungan untuk menjaga efektivitas pengendalian risiko;
- l. Manajemen perlu menerapkan pendekatan *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dalam menjalankan tata kelola perusahaan;
- m. Manajemen perlu memastikan seluruh proses bisnis Perseroan telah sesuai dengan peraturan perpajakan;
- n. Manajemen perlu memastikan kelengkapan SOP untuk semua proses bisnis perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- o. Manajemen disarankan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, PSAK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan menghindari praktik *window dressing*.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut :

1. Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama Independen dan telah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 27 Maret 2025.
2. Untuk Komisaris Anggota telah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 12 Maret 2025

APRESIASI

Capaian kinerja PT Jamkrida Jabar tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Oleh karenanya, perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris, menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb sebagai pemegang saham, Direksi serta seluruh karyawan dan mitra-mitra usaha kami.

Kami berharap agar hubungan yang terjalin dengan baik selama ini akan terus terjaga baik di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik dan kerja keras, kami optimis dapat terus membantu dan mengembangkan pelaku KUMKM dalam meningkatkan usahanya demi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan pada gilirannya juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Semoga kita semua selalu dalam bimbingan, lindungan, serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bandung, Mei 2026

Dewan Komisaris
PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

Muhammad Iskandar
Komisaris Utama Independen

Yogi Gautama Jaelani
Komisaris

Laporan Dewan Pengawas Syariah



Khozin Abu Faqih

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Zaini Abdul Malik

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW, serta mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Perkenankanlah kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menyampaikan bahwa DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. DPS berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) seperti PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

Sesuai tugas dan fungsinya, DPS telah mengawasi operasional Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) agar sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah.

PENGAWASAN DI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

DPS juga telah melakukan review atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan review atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) selama tahun 2025 antara lain mencakup:

1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.

6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2025, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda), semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda). Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

HARAPAN DI TAHUN 2026

Dewan Pengawas Syariah berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dapat terus meningkatkan kinerja dan tata kelola dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik.

Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi DPS.

APRESIASI

DPS memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda), khususnya UUS, dengan kinerja yang baik.

Dalam kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar (Perseroda), khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda), agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dapat turut mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan pembiayaan/pinjaman syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

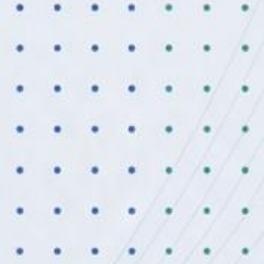
Bandung, Mei 2026

Dewan Pengawas Syariah
PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Khozin Abu Faqih
Anggota Dewan Pengawas Syariah

PROFIL PERUSAHAAN 2025



PT JAMKRIDA JABAR

PROFIL PERUSAHAAN

SEKILAS JAMKRIDA JABAR

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun manfaat dari pembentukan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah:

1. Dapat membantu dalam memenuhi persyaratan agunan/jaminan (*collateral*) karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti agunan (*collateral substitution*).
2. Sebagai penjamin dapat meminimalisasi risiko kredit melalui transfer risiko dari penerima jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.
3. Selain itu, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) tidak hanya memberikan keuntungan material yang didapat oleh pemegang saham, tetapi juga keuntungan immaterial didapatkan oleh pihak lain yaitu:
 - a. Pemerintah
Terkait dengan berbagai program pengembangan KUMKM
 - Mendukung peningkatan fungsi intermediasi.
 - Meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat menstimulasi perkembangan perekonomian nasional.
 - b. Perbankan
Dengan adanya penjaminan kredit dari PT Jamkrida Jabar (Perseroda) maka penyaluran kredit (terutama kredit produktif) dari perbankan akan semakin optimal.
 - c. KUMKM
Kendala kekurangan agunan yang selama ini menjadi salah satu hambatan KUMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan akan semakin optimal.
 - d. Masyarakat
Dengan semakin berkembangnya KUMKM maka diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja (peningkatan penyerapan tenaga kerja).

LEGALITAS USAHA

Perseroan telah memiliki izin dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tercantum dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jabar Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012, beserta Akta perubahan-perubahannya.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 56159.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 01 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya.
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.05/D.05/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 30 Januari 2013.
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
8. Izin Gangguan Nomor: 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015.
9. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.
10. Surat Izin Operasi Tingkat Nasional dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-3912/NB.111/2015 tanggal 14 Juli 2015.
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 101116418463 tanggal 12 September 2018.
12. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120304971535 tanggal 13 September 2019.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEMBAGA PENJAMIN

1. UU Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. POJK Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
3. POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
4. POJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
5. POJK Nomor: 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP Nomor: 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
4. Pergub. Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola BUMD Provinsi Jawa Barat.



VISI & MISI PERUSAHAAN



VISI

Menjadi Perusahaan
Penjaminan Kredit **Terpercaya**
yang Berkontribusi pada
Pertumbuhan Ekonomi Daerah



MISI

Meningkatkan Kegiatan Ekonomi
UMKM dan Memberikan Manfaat
bagi Pemangku Kepentingan melalui
Penjaminan Kredit yang **Efisien,**
Profesional,
dan **Berintegritas**



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

PT Jamkrida Jabar (Persero) memiliki nilai-nilai BISA sebagai budaya kerja dalam Perusahaan yang mendorong peningkatan kinerja dan mempertegas okupasi pasar terhadap layanan atau produk perusahaan.

**NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES**

B  **BUILD**
Membangun dan mengembangkan masyarakat KUMKM di Jawa Barat.
Building and developing a Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSMEs) community in West Java.

I  **INTEGRITY**
Pengelolaan Perseroan dilakukan dengan semangat integritas dan profesionalisme yang tinggi
The management of the Company is carried out with a high spirit of integrity and professionalism

S  **SPEED**
Perseroan memberikan pelayanan kepada nasabah dan mitra dengan cepat dan terpercaya
The Company provides services to customers and partners quickly and reliably

A  **ACCOUNTABLE**
Pengelolaan Perseroan dengan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan
Company management with accountable policies

PRODUK DAN LAYANAN

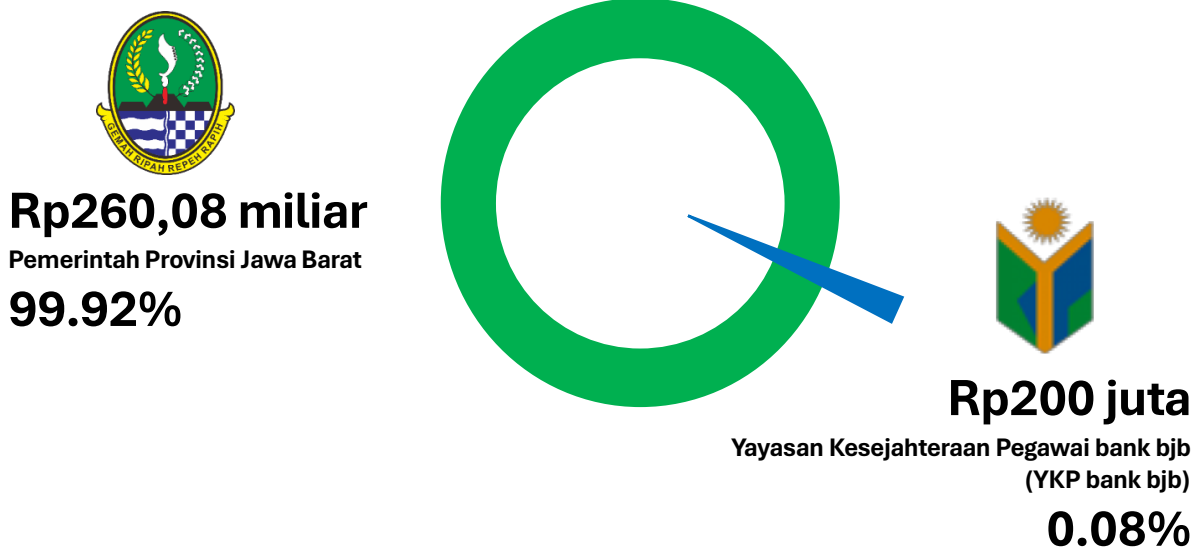
PRODUK DAN LAYANAN PENJAMINAN*

1. Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya.
3. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
4. Penjaminan atas surat utang;
5. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
6. Penjaminan transaksi dagang;
7. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
8. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
9. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
10. Penjaminan *letter of credit*;
11. Penjaminan kepabeanan (customs bond);
12. Penjaminan cukai;
13. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
14. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

*Berdasarkan POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

INFORMASI MODAL DAN PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)”. Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp260,28 miliar dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetorkan saham pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebesar Rp260.080.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah), sedangkan pemegang saham lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb (YKP bank bjb) telah menyetorkan saham senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, sisa saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda) yang masih dalam simpanan (portepel) adalah senilai Rp510.148.800.000,- (lima ratus sepuluh miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau 51.015 (lima puluh satu ribu lima belas) lembar saham.

Pada tanggal 20 Maret 2024, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyetujui dan menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait Perseroan dan kemudian pada tanggal 25 April 2024, Gubernur Jawa Barat telah menandatangani dan menetapkannya, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda).
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda).

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, juga mengatur adanya peningkatan modal dasar Perseroan dimana pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa modal dasar PT Jamkrida Jabar (Persero) ditetapkan sebesar Rp1.041.120.000.000,- (satu triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 pada:

1. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar Rp270.891.200.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis Perseroan.
2. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2024.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MUHAMMAD ISKANDAR

Komisaris Utama Independen

Tempat dan Tanggal Lahir

Banda Aceh, Desember 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

University of Maryland Collage Park, USA

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-57/KO.12/2025 tanggal 27 Maret 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Komisaris Utama Independen pada 28 Oktober 2024 dan definitif menjabat pada 27 Maret 2025 sampai dengan saat ini, dengan melanjutkan masa jabatan sebelumnya selaku Komisaris Independen sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bulan November tahun 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Utama Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda), efektif sejak dinyatakan lulus Fit an Proper Test OJK pada 27 Maret 2025 sampai dengan saat ini
- Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda)), efektif sejak dinyatakan lulus Fit an Proper Test OJK pada 03 Mei 2024 sampai dengan 26 Maret 2025.
- Salah satu pendiri dan Direktur Utama TOP Grup mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini.

- *Head of Business Advisory* dan *Head of Asset Management & Investment* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- *President Director* (CEO) PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- *Vice President* PT Indofood Sukses Makmur Tbk. – Bogasari Flour Mills.

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Iskandar tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Iskandar tidak memiliki saham Perusahaan



YOGI GAUTAMA JAELANI

Komisaris

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, Juni 1973

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S-2 Studi Pembangunan Magister Teknik ITB
- S-1 Hukum Universitas Parahyangan

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nomor 03 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-47/KO.12/2025 tanggal 12 Maret 2025

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Komisaris pada 28 Oktober 2024 dan definitif menjabat pada 12 Maret 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) – Oktober 2024 sampai dengan saat ini.
- Kepala Biro Hukum dan HAM - September 2023 sampai dengan saat ini.
- Pelaksana Tugas Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat – Tahun 2021.
- Kepala Bagian Investasi Daerah dan administrasi Pembangunan – Tahun 2019 sami dengan Tahun 2023.

HUBUNGAN AFILIASI

Yogi Gautama tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Yogi Gautama tidak memiliki saham Perusahaan

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, Januari 1975

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat, Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan



KHOZIN ABU FAQIH

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tempat dan Tanggal Lahir

Gresik, September 1969

RIWAYAT PENDIDIKAN

Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah, mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini.
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1996.
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan

PROFIL DIREKSI



BOBBY CAHYADI

Direktur Utama

Tempat dan Tanggal Lahir

Jakarta, Maret 1986

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 Manajemen Asuransi di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi 2008

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 05 Juni 2025, sesuai dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tandy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025 dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-93/KO.12/2025 tanggal 04 September 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Direktur Utama pada 05 Juni 2025 dan definitif menjabat pada 04 September 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Utama PT Jamkrida Jabar (Perseroda)), efektif sejak dinyatakan lulus Fit and Proper Test OJK pada September 2025 sampai dengan saat ini .
- Wakil Pemimpin Wilayah Surabaya PT Asuransi Kredit Indonesia mulai Mei 2010 sampai dengan Juli 2025
- *Senior Staf Agency* Departement PT Asuransi Tokio Marine Indonesia mulai November 2009 sampai dengan April 2010

- *Relationship Officer Bancassurance* PT Lippo General Insurance mulai Maret 2009 sampai dengan Oktober 2009
- *Marketing Support Agen Telemarketing* PT. Asuransi Central Asia mulai September 2003 sampai dengan Maret 2009

HUBUNGAN AFILIASI

Bobby Cahyadi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Bobby Cahyadi tidak memiliki saham Perusahaan



MUJI ROHMAD

Direktur Utama

Tempat dan Tanggal Lahir

Bantul, Agustus 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 Juni 2025 sesuai dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tedy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025 dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-114/KO.12/2025 tanggal 04 November 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Direktur Keuangan pada 05 Juni 2025 dan definitif menjabat pada 04 September 2025 samapi dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda), efektif sejak dinyatakan lulus Fit an Proper Test OJK pada November 2025 sampai dengan saat ini.
- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai tahun 2018 samapi dengan Oktober 2025.
- Finance Manager PT Lintas Media Telekomunikasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
- Head Division Finance & Accounting dan CFO Bosowa Resources Group pada PT Bosowa Resources PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

- Ketua Tim dan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2010

HUBUNGAN AFILIASI

Muji Rohmad tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

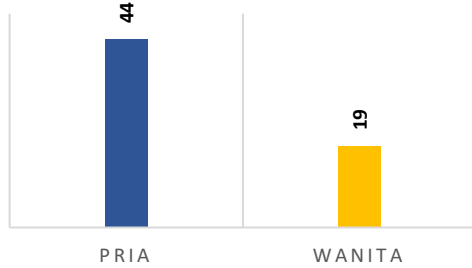
Muji Rohmad tidak memiliki saham Perusahaan

DATA DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

DISTRIBUSI GENDER

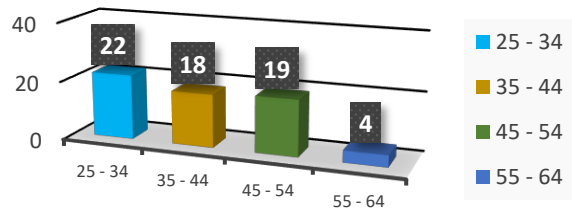
(DALAM ORANG)

■ PRIA ■ WANITA



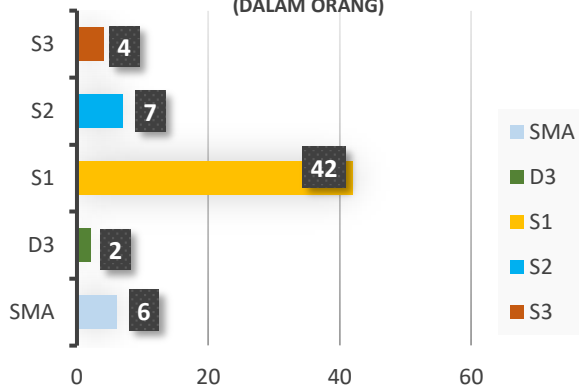
DISTRIBUSI USIA

(DALAM ORANG)



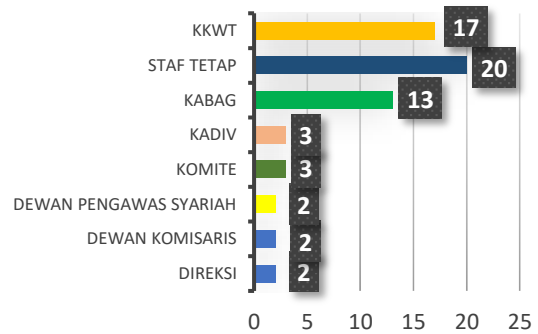
TINGKAT PENDIDIKAN

(DALAM ORANG)



DISTRIBUSI PEGAWAI

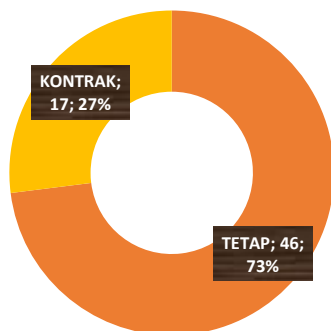
(DALAM ORANG)



STATUS KEPEGAWAIAN

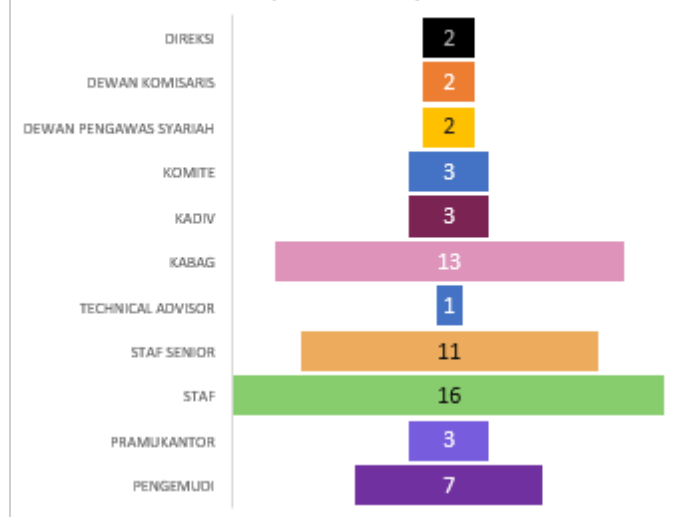
(DALAM ORANG)

■ TETAP ■ KONTRAK



TINGKAT JABATAN

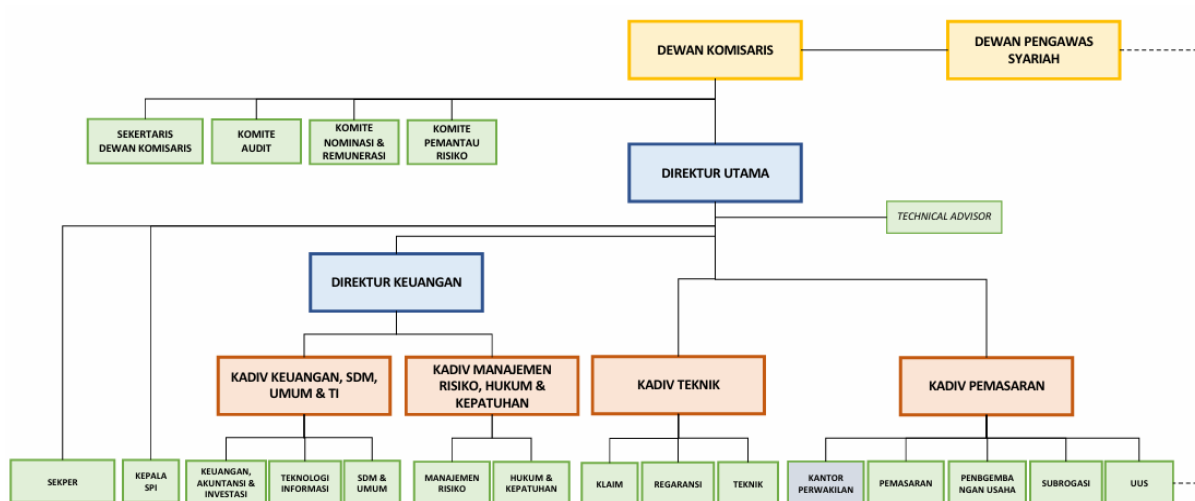
(DALAM ORANG)



STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan operasional usahanya, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) memiliki struktur organisasi yang memuat fungsi-fungsi antara lain dan tidak terbatas pada:

1. Fungsi Penjaminan Bank dan Non-Bank;
2. Fungsi Penjaminan Syariah;
3. Fungsi Manajemen Risiko, Klaim, dan Subrogasi;
4. Fungsi Keuangan, SDM, dan Umum;
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan, Hukum, dan Tekonologi Informasi;
6. Fungsi Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.



Struktur Pengurus PT Jamkrida Jabar (Perseroda) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama Independen : Muhammad Iskandar
2. Komisaris : Yogi Gautama Jaelani

Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah : Zaini Abdul Malik
2. Dewan Pengawas Syariah : Khozin Abu Faqih

Direksi

1. Direktur Utama : Bobby Cahyadi
2. Direktur Operasional : Muji Rohmad

KINERJA PERSEROAN 2025



TINJAUAN EKONOMI

Perekonomian global pada tahun 2025 masih diwarnai oleh dinamika ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju, tingginya tensi geopolitik global, serta fluktuasi harga komoditas dan suku bunga internasional. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap arus perdagangan dunia, investasi, dan stabilitas pasar keuangan, termasuk terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang cukup baik dengan didukung oleh konsumsi domestik, aktivitas investasi, serta kinerja sektor usaha yang tetap bertumbuh secara moderat.

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Stabilitas inflasi yang relatif terkendali, dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta keberlanjutan program pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan penguatan UMKM menjadi faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus mendorong percepatan transformasi digital, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di Provinsi Jawa Barat, perkembangan ekonomi pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dengan didukung oleh aktivitas industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, pertanian, konstruksi, serta sektor jasa lainnya. Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan nasional, Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemulihan daya beli masyarakat, meningkatnya mobilitas ekonomi, serta tumbuhnya aktivitas usaha produktif turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Selain itu, perkembangan sektor UMKM di Jawa Barat terus menunjukkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten memberikan berbagai stimulus dan program pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap dukungan penjaminan kredit sebagai salah satu instrumen dalam memperluas akses pembiayaan usaha.

Sebagai perusahaan penjaminan, PT Jamkrida Jabar (Persero) memandang bahwa kondisi ekonomi tahun 2025 tetap memberikan peluang sekaligus tantangan bagi industri penjaminan. Di satu sisi, pertumbuhan sektor usaha dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan produktif membuka peluang peningkatan volume penjaminan. Namun di sisi lain, perusahaan juga perlu tetap memperhatikan kualitas penjaminan, pengelolaan risiko, serta dinamika kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran debitur.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, PT Jamkrida Jabar (Persero) terus berupaya memperkuat peran strategis perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan penjaminan yang prudent, adaptif, dan berkelanjutan. Perseroan juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan di Jawa Barat.

Dengan berbagai upaya tersebut, Perseroan optimis dapat terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

TINJAUAN PROSPEK MASA DEPAN

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) memandang bahwa prospek usaha industri penjaminan ke depan masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran industri penjaminan dinilai akan semakin strategis dalam mendukung peningkatan akses keuangan, penguatan sektor produktif, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tetap stabil dalam beberapa tahun mendatang diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas usaha, investasi, serta penyaluran kredit oleh lembaga keuangan. Kondisi tersebut akan membuka peluang yang lebih luas bagi Perseroan untuk meningkatkan volume penjaminan, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang. Selain itu, tingginya aktivitas sektor industri, perdagangan, jasa, konstruksi, dan sektor produktif lainnya menjadi peluang bagi Perseroan untuk terus mengembangkan produk dan layanan penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di tengah perkembangan tersebut, Perseroan menyadari bahwa tantangan industri penjaminan ke depan juga akan semakin kompleks. Ketidakpastian kondisi ekonomi global, perubahan regulasi, perkembangan teknologi digital, persaingan usaha, serta potensi peningkatan risiko pembiayaan menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara cermat. Oleh karena itu, Perseroan akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas manajemen risiko, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan yang berkelanjutan, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) akan terus melakukan penguatan strategi bisnis melalui diversifikasi produk penjaminan, pengembangan layanan berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Perseroan juga akan terus memperluas kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan non-bank, pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya untuk meningkatkan penetrasi pasar penjaminan.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, Perseroan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memperkuat budaya perusahaan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi transformasi digital dan peningkatan efisiensi operasional juga akan menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing Perseroan di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan potensi pasar yang masih terbuka luas, dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM, serta komitmen Perseroan dalam memperkuat kualitas layanan dan pengelolaan risiko, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) optimis mampu menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan serta terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN BISNIS

Kinerja bisnis penjaminan PT Jamkrida Jabar pada 2025 dinilai telah mengalami peningkatan, dan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Volume Kredit tahun 2025 adalah senilai Rp8,48 triliun atau terealisasi sebesar 81,19% dari RKAP 2025, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp13,12 triliun (terealisasi 81,50%) dan Non Produktif senilai Rp5,35 triliun (terealisasi 80,45%). Volume Kredit tahun 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 45,22% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- b. Volume Pembiayaan yang dijamin tahun 2025 adalah senilai Rp8,86 triliun atau terealisasi sebesar 89,98% dari RKAP 2025, di mana Volume Pembiayaan Produktif senilai Rp7,30 triliun (tercapai 85,30%) dan Non Produktif senilai Rp1,57 miliar (tercapai 120,82%). Volume Pembiayaan tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 104,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- c. Volume Penjaminan tahun 2025 adalah senilai Rp12,5 triliun atau terealisasi sebesar 76,70% dari RKAP 2025, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp7,49 triliun (terealisasi 74,03%) dan Non Produktif senilai Rp5,012 triliun (terealisasi 81,07%). Volume Penjaminan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 27,82% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- d. Volume Kafalah tahun 2025 adalah senilai Rp5,62 triliun atau terealisasi sebesar 94,85% dari RKAP 2025, di mana Volume Kafalah Produktif senilai Rp4,31 triliun (tercapai 92,65%) dan Non Produktif senilai Rp1,31 miliar (tercapai 102,86%). Volume Kafalah tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 103,24% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- e. Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2025 adalah senilai Rp252,18 miliar atau terealisasi sebesar 80,12% dari RKAP 2025, dimana IJP Produktif senilai Rp79,37 miliar (terealisasi 78,68%) dan Non Produktif senilai Rp172,81 miliar (terealisasi 80,80%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- f. Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2025 adalah senilai Rp74,41 miliar atau terealisasi sebesar 78,10% dari RKAP 2025, di mana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp41 miliar (tercapai 53,91%) dan Non Produktif senilai Rp33,35 miliar (tercapai 174,47%). Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 63,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- g. Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2025 adalah senilai Rp339,91 miliar atau terealisasi sebesar 129,97% dari RKAP 2025, dimana volume IJP Produktif senilai Rp84,43 miliar (terealisasi 48,05%) dan Non Produktif senilai Rp255,48 miliar (terealisasi 297,65%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 41,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- h. Pendapatan IJK *Accrual Basis* tahun 2025 adalah senilai Rp67,13 miliar atau terealisasi mendekati target RKAP tahun 2025 yaitu sebesar 99,59%, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp33,08 miliar (tercapai 58,80%) dan Non Produktif senilai Rp34,04 miliar (tercapai 305,78%). Pendapatan IJK *Accrual Basis* tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 118,27% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- i. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 adalah sebanyak 1.201.995 unit atau terealisasi sebesar 60,61% dari RKAP 2025. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 139,69% jika dibandingkan tahun 2024.

- j. Jumlah KUMKM Terjamin (Makful Anhu) untuk Unit Usaha Syariah tahun 2025 adalah sebanyak 1.031.322 unit atau terealisasi sebesar 93,03% dari RKAP 2025. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 122,94% jika dibandingkan tahun 2024

TINJAUAN KEUANGAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	157.059,29	157.881,62	181.636,94	115,05%	15,65%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(193,02)	(842,94)	(425,84)	50,52%	120,61%
Surat Berharga	109.766,72	191.176,93	168.806,46	88,30%	53,79%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	(555,50)	-	0,00%	-100,00%
Piutang Re/Cogaransi	186.042,38	177.656,80	164.102,54	92,37%	-11,79%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(6.982,18)	(3.513,32)	(6.664,01)	189,68%	-4,56%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10.178,55	8.052,97	9.393,28	116,64%	-7,72%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(194,52)	(206,74)	(48,67)	23,54%	-74,98%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	31.966,62	38.949,38	32.884,68	84,43%	2,87%
Piutang Lain-Lain	685,31	4.161,90	3.931,88	94,47%	473,74%
Properti Investasi	2.626,97	2.626,97	2.580,30	98,22%	-1,78%
JUMLAH ASET LANCAR	490.956,11	575.388,07	556.197,57	96,66%	13,29%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	105.100,75	106.847,48	84.737,44	79,31%	-19,38%
Aset Tetap - Bersih	12.562,55	13.598,16	12.528,14	92,13%	-0,27%
Aset Pajak Tangguhan	5.937,96	-	5.236,80	0,00%	-11,81%
Piutang Estimasian	14.527,97	-	14.977,02	-	-
Aset Lain-Lain	971,26	2.643,48	1.467,63	55,52%	51,11%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	139.100,50	123.089,12	118.947,03	96,63%	-14,49%
JUMLAH ASET	630.056,61	698.477,19	675.144,60	96,66%	7,16%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	408,84	3.782,37	2.506,38	66,26%	513,04%
Utang Re/Cogaransi	43.362,80	40.175,45	41.720,44	103,85%	-3,79%
Utang Klaim	-	-	1.411,65	0,00%	0,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.955,71	1.213,45	7.976,72	657,36%	60,96%
Penampungan Sementara	11.862,54	12.654,84	14.142,28	111,75%	19,22%
Utang Lancar Lainnya	23,92	1.125,79	108,86	9,67%	355,15%
Liabilitas Penjaminan Lainnya	2.674,62	-	15.622,37	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	57.870,93	71.854,04	62.083,82	86,40%	7,28%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	121.159,36	130.805,94	145.572,51	111,29%	20,15%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	158.313,20	175.683,17	163.681,48	93,17%	3,39%
Cadangan Klaim	25.435,09	34.121,25	27.359,17	80,18%	7,56%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3.195,68	3.854,08	3.273,32	84,93%	2,43%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	186.943,97	213.658,50	194.313,97	90,95%	3,94%
JUMLAH LIABILITAS	308.103,33	344.464,44	339.886,47	98,67%	10,32%
EKUITAS					
Modal	260.280,00	287.369,12	260.280,00	90,57%	0,00%
Cadangan Umum	53.750,04	55.515,27	57.268,01	103,16%	6,55%
Saldo Laba	10.051,34	9.925,35	15.356,81	154,72%	52,78%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(1.667,52)	1.486,04	2.873,59	193,37%	-272,33%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(460,58)	(283,03)	(520,28)	183,83%	12,96%
JUMLAH EKUITAS	321.953,27	354.012,75	335.258,12	94,70%	4,13%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	630.056,61	698.477,19	675.144,60	96,66%	7,16%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

B. LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	245.378,15	261.537,23	342.505,53	130,96%	39,58%
Beban Akuisisi	(33.634,66)	(27.641,66)	(34.928,49)	126,36%	3,85%
Restitusi IJP	(5.276,93)	(4.872,16)	(2.593,41)	53,23%	-50,85%
Manajemen Fee	27.182,43	18.236,83	33.544,84	183,94%	23,41%
Beban Regaransi	(129.789,68)	(87.545,26)	(210.900,68)	240,90%	62,49%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	103.859,31	159.714,98	127.627,80	79,91%	22,89%
KLAIM					
Beban Klaim	(84.124,25)	(110.021,63)	(97.819,72)	88,91%	16,28%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	(2.802,86)	(6.589,68)	(1.475,03)	22,38%	-47,37%
JUMLAH KLAIM	(86.927,11)	(116.611,31)	(99.294,75)	85,15%	14,23%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	103.859,31	159.714,98	127.627,80	79,91%	22,89%
JUMLAH KLAIM	(86.927,11)	(116.611,31)	(99.294,75)	85,15%	14,23%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	16.932,20	43.103,67	28.333,05	65,73%	67,33%
PENDAPATAN INVESTASI	16.162,89	13.458,25	20.038,01	148,89%	23,98%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.327,19	6.696,45	5.754,28	85,93%	72,95%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	6.902,08	3.590,36	71,82	2,00%	-98,96%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(6.776,87)	(8.594,47)	(5.032,65)	58,56%	-25,74%
Beban Sumber Daya Manusia	(20.972,85)	(30.655,67)	(24.537,56)	80,04%	17,00%
Beban Administrasi & Umum	(7.470,82)	(11.497,00)	(7.670,12)	66,71%	2,67%
JUMLAH BEBAN USAHA	(35.220,54)	(50.747,13)	(37.240,33)	73,38%	5,73%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	8.103,82	16.101,59	16.956,82	105,31%	109,24%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.947,51	(6.176,24)	(1.600,01)	25,91%	-182,16%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10.051,34	9.925,35	15.356,81	154,72%	52,78%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(1.867,92)	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	8.183,41	9.925,35	15.356,81	154,72%	87,66%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Berdasarkan data pada tabel Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Total Aset

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp675,14 miliar atau sebesar 96,66% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 7,16% jika dibandingkan tahun 2024.

2. Total Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp335,26 miliar atau sebesar 94,70% dari RKAP 2025 yang ditargetkan senilai Rp354,01 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,13% jika dibandingkan tahun 2024.

3. Laba (Rugi)

Pada tahun 2024 Perseroan membukukan Laba Bersih senilai Rp15,36 miliar atau sebesar 154,72% dari RKAP 2025 yang ditargetkan senilai Rp9,93 miliar, dan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 52,78% jika dibandingkan perolehan tahun 2024.

4. Pendapatan Penjaminan

Pada tahun 2025 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp127,63 miliar atau mencapai 79,91% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 22,89% jika dibandingkan perolehan tahun 2024.

5. Pendapatan Investasi

Pada tahun 2025 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp20,04 miliar atau mencapai 148,89% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 23,98% jika dibandingkan perolehan tahun 2024.

6. Pendapatan Subrogasi

Pada tahun 2025 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp5,75 miliar atau mencapai 85,93% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 72,95% jika dibandingkan perolehan tahun 2024.

7. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Pada Tahun 2024 Perseroan mengakui Pendapatan Lain-Lain senilai Rp71,81 juta, sedangkan pada tahun 2024 mencatat Beban Lain-lain senilai Rp6,9 miliar, mengalami penurunan sebesar 98,96%.

8. Total Klaim

Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di tahun 2025 adalah senilai Rp97,82 miliar atau mencapai 88,91% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 16,28% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

9. Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan di tahun 2025 adalah senilai Rp37,24 miliar atau mencapai 73,38% dari RKAP 2025 dan mengalami kenaikan sebesar 5,73% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

TINJAUAN OPERASIONAL

A. ASPEK PENJAMINAN

VOLUME KREDIT PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT					
a. Produktif	7.630.796,41	16.102.493,40	13.123.984,80	81,50%	71,99%
b. Non Produktif	5.091.616,93	6.651.717,71	5.351.280,41	80,45%	5,10%
JUMLAH	12.722.413,34	22.754.211,11	18.475.265,21	81,19%	45,22%
KATEGORI PRODUK					
a. Kredit Usaha Menengah	2.533.379,83	3.837.697,25	3.676.261,79	95,79%	45,11%
b. Kredit Usaha Kecil	135.142,06	199.087,69	100.963,00	50,71%	-25,29%
c. Kredit Usaha Mikro	2.097.087,43	8.213.515,55	5.273.208,88	64,20%	151,45%
d. Kredit Koperasi	118.785,61	117.157,63	108.193,48	92,35%	-8,92%
e. Kredit Konstruksi	2.107.198,08	3.008.704,80	3.484.449,62	115,81%	65,36%
f. Bank Garansi	621.913,35	684.437,14	469.222,57	68,56%	-24,55%
g. Surety Bond	17.290,05	41.893,35	11.685,46	27,89%	-32,42%
h. Kredit Multiguna	5.091.616,93	6.651.717,71	5.351.280,41	80,45%	5,10%
JUMLAH	12.722.413,34	22.754.211,11	18.475.265,21	81,19%	45,22%

Volume Kredit tahun 2025 adalah senilai Rp8,48 triliun atau terealisasi sebesar 81,19% dari RKAP 2025, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp13,12 triliun (terealisasi 81,50%) dan Non Produktif senilai Rp5,35 triliun (terealisasi 80,45%). Volume Kredit tahun 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 45,22% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

VOLUME PENJAMINAN PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT					
a. Produktif	4.796.632,40	10.126.406,66	7.496.293,64	74,03%	56,28%
b. Non Produktif	4.989.416,83	6.182.658,83	5.012.331,68	81,07%	0,46%
JUMLAH	9.786.049,23	16.309.065,49	12.508.625,32	76,70%	27,82%
KATEGORI PRODUK					
a. Kredit Usaha Menengah	1.395.432,17	1.890.949,24	1.390.193,48	73,52%	-0,38%
b. Kredit Usaha Kecil	94.599,44	139.361,38	70.674,10	50,71%	-25,29%
c. Kredit Usaha Mikro	1.069.511,54	5.015.879,07	2.754.436,07	54,91%	157,54%
d. Kredit Koperasi	118.785,61	101.849,14	108.038,48	106,08%	-9,05%
e. Kredit Konstruksi	1.479.100,24	2.251.994,91	2.692.813,90	119,57%	82,06%
f. Bank Garansi	621.913,35	684.437,45	468.452,15	68,44%	-24,68%
g. Surety Bond	17.290,05	41.935,48	11.685,46	27,87%	-32,42%
h. Kredit Multiguna	4.989.416,83	6.182.658,83	5.012.331,68	81,07%	0,46%
JUMLAH	9.786.049,23	16.309.065,49	12.508.625,32	76,70%	27,82%

Volume Penjaminan tahun 2025 adalah senilai Rp12,5 triliun atau terealisasi sebesar 76,70% dari RKAP 2025, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp7,49 triliun (terealisasi 74,03%) dan Non Produktif senilai Rp5,012 triliun (terealisasi 81,07%). Volume Penjaminan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 27,82% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MENENGAH

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Menengah tahun 2025 adalah senilai Rp1,39 triliun atau mencapai 73,52% dari RKAP 2025, mengalami penurunan sebesar 0,38% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Kecil tahun 2025 adalah senilai Rp70,67 miliar atau mencapai 50,71% dari RKAP 2025 dan mengalami penurunan sebesar 25,29% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Mikro tahun 2025 adalah senilai Rp2,75 triliun atau mencapai 54,91% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan signifikan sebesar 157,54% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

PENJAMINAN KREDIT KOPERASI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Koperasi tahun 2025 adalah senilai Rp108,04 miliar atau mencapai 106,08% dari RKAP 2025 dan mengalami penurunan sebesar 9,05% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2025 adalah senilai Rp2,69 triliun atau mencapai 119,57% dari RKAP 2025 dan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 82,06% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) tahun 2025 adalah senilai Rp468,45 miliar atau mencapai 68,44% dari RKAP 2025 namun mengalami penurunan sebesar 24,68% jika dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi penjaminan pada segmen Bank Garansi menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi eksternal maupun internal perusahaan.

SURETY BOND

Realisasi Volume Surety Bond tahun 2025 adalah senilai Rp11,68 miliar atau mencapai 27,87% dari RKAP 2025 dan mengalami penurunan sebesar 32,42% jika dibandingkan realisasi tahun 2024. Produk Surety Bond memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan proyek, sehingga penurunan jumlah tender maupun nilai kontrak secara langsung berdampak pada berkurangnya kebutuhan atas produk penjaminan tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi yang cenderung moderat mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, yang turut menekan permintaan terhadap fasilitas penjaminan.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2025 adalah senilai Rp5,01 triliun atau mencapai 81,07% dari RKAP 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 0,46% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

IMBAL JASA PENJAMINAN CASH BASIS PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT					
a. Produktif	79.371,77	218.272,97	96.892,81	44,39%	22,07%
b. Non Produktif	172.808,25	92.739,88	254.154,61	274,05%	47,07%
JUMLAH	252.180,02	311.012,85	351.047,42	112,87%	39,21%
KATEGORI PRODUK					
a. Kredit Usaha Menengah	39.443,92	59.528,05	35.484,85	59,61%	-10,04%
b. Kredit Usaha Kecil	4.233,93	6.573,08	2.649,73	40,31%	-37,42%
c. Kredit Usaha Mikro	10.434,07	120.396,36	29.480,30	24,49%	182,54%
d. Kredit Koperasi	1.385,31	1.527,74	2.141,07	140,15%	54,56%
e. Kredit Konstruksi	18.088,01	24.303,52	22.831,99	93,95%	26,23%
f. Bank Garansi	5.378,57	5.601,06	4.085,54	72,94%	-24,04%
g. Surety Bond	407,97	343,16	219,33	63,92%	-46,24%
h. Kredit Multiguna	172.808,25	92.739,88	254.154,61	274,05%	47,07%
JUMLAH	252.180,02	311.012,85	351.047,42	112,87%	39,21%

Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2025 adalah senilai Rp252,18 miliar atau terealisasi sebesar 80,12% dari RKAP 2025, dimana IJP Produktif senilai Rp79,37 miliar (terealisasi 78,68%) dan Non Produktif senilai Rp172,81 miliar (terealisasi 80,80%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

IMBAL JASA PENJAMINAN ACCRUAL BASIS (*) PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT					
a. Produktif	82.569,71	175.704,26	84.432,34	48,05%	2,26%
b. Non Produktif	157.531,51	85.832,97	255.479,78	297,65%	62,18%
JUMLAH	240.101,22	261.537,23	339.912,12	129,97%	41,57%
KATEGORI PRODUK					
a. Kredit Usaha Menengah	38.374,23	48.753,62	32.406,30	66,47%	-15,55%
b. Kredit Usaha Kecil	4.307,92	6.247,06	4.792,71	76,72%	11,25%
c. Kredit Usaha Mikro	15.448,27	90.878,36	23.870,42	26,27%	54,52%
d. Kredit Koperasi	2.164,95	1.297,12	1.547,80	119,33%	-28,51%
e. Kredit Konstruksi	15.985,01	22.539,39	17.906,15	79,44%	12,02%
f. Bank Garansi	6.005,63	5.430,49	3.660,57	67,41%	-39,05%
g. Surety Bond	283,69	558,23	248,39	44,50%	-12,44%
h. Kredit Multiguna	157.531,51	85.832,97	255.479,78	297,65%	62,18%
JUMLAH	240.101,22	261.537,23	339.912,12	129,97%	41,57%

(*) termasuk restitusi IJP

Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2025 adalah senilai Rp339,91 miliar atau terealisasi sebesar 129,97% dari RKAP 2025, dimana volume IJP Produktif senilai Rp84,43 miliar (terealisasi 48,05%) dan Non Produktif senilai Rp255,48 miliar (terealisasi 297,65%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 41,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

JUMLAH KUMKM PERIODE 2025

dalam satuan unit

SUMBER TERJAMIN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PRODUK					
a. Kredit Usaha Menengah	3.090	24.681	4.819	19,53%	55,95%
b. Kredit Usaha Kecil	566	981	354	36,09%	-37,46%
c. Kredit Usaha Mikro	489.004	1.947.651	1.187.814	60,99%	142,90%
d. Kredit Koperasi	2.570	1.924	2.562	133,16%	-0,31%
e. Kredit Konstruksi	1.396	2.441	2.267	92,87%	62,39%
f. Bank Garansi	4.820	4.742	4.164	87,81%	-13,61%
g. Surety Bond	23	616	15	2,44%	-34,78%
JUMLAH	501.469	1.983.036	1.201.995	60,61%	139,69%

Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 adalah sebanyak 1.201.995 unit atau terealisasi sebesar 60,61% dari RKAP 2025. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 139,69% jika dibandingkan tahun 2024.

B. ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan secara lebih sistematis.

Proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Analisis risiko
3. Penilaian risiko
4. Penanganan dan mitigasi risiko
5. Monitoring dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko *moral hazard*). Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara melakukan analisa penjaminan kredit menggunakan

prinsip 4P (*Personality, Payment, prospect, dan Protection*) atau 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), mempersyaratkan adanya agunan sesuai risiko yang dijamin dan peralihan hak tagih (subrogasi), melakukan penyebaran risiko melalui skema penjaminan ulang / reasuransi dan penjaminan bersama dengan Perusahaan Penjaminan sejenis (*co-guarantee*) ataupun mengalihkan risiko kepada Perusahaan Asuransi Jiwa khusus untuk risiko jiwa.

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroan) masih bersifat periodik dan insidental. Di mana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap penjaminan per skim kredit per mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi Perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerja sama baru, penempatan instrumen investasi, dan kajian bisnis lainnya). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut dibahas dalam Rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar (Perseroan) untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan memiliki beberapa komite di bawah Direksi, yaitu Komite Penjaminan, Komite Investasi, dan Komite Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas, membuat analisa, merumuskan, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan yang telah atau akan diambil oleh manajemen.

Komite Penjaminan memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan, serta melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan.

Komite Investasi memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Komite Klaim memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan, melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim, serta memberikan keputusan klaim.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2025, diantaranya:

1. Menyesuaikan dan melakukan perubahan perjanjian kerja sama (PKS) mitra penjaminan dengan prinsip *profitable* dan berbasis risiko disesuaikan dengan kebijakan *underwriting* perusahaan.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan mengalihkan risiko jiwa kepada asuransi jiwa dan risiko macet dialihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi / Penjaminan Ulang dengan skema reasuransi dan/atau melalui beberapa perusahaan penjaminan sejenis dengan skema kogaransi.
3. Melakukan optimalisasi pendapatan investasi berbasis resiprokal dan *profitable* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif.
4. Mengembangkan sistem pengendalian internal berbasis pertahanan tiga lapis (*three lines of defense*) untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen :

- a. Lapis pertama (*first line*), merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja yang menjalankan fungsi bisnis/operasional dan melaksanakan proses manajemen risiko di unit kerja masing-masing.
- b. Lapis kedua (*second line*), merupakan tugas dan tanggung jawab unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pengendalian.
- c. Lapis ketiga (*third line*), merupakan tugas dan tanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal.

C. ASPEK KLAIM DAN SUBROGASI

KLAIM DAN SUBROGASI PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

URAIAN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
BEBAN KLAIM					
a. Konvensional	70.461,47	84.529,01	69.887,75	82,68%	-0,81%
b. Syariah	13.662,79	25.492,62	27.931,97	109,57%	104,44%
JUMLAH	84.124,25	110.021,63	97.819,72	88,91%	16,28%
PENDAPATAN SUBROGASI					
a. Konvensional	2.720,61	5.060,32	4.205,97	83,12%	54,60%
b. Syariah	606,58	1.636,13	1.548,31	94,63%	155,25%
JUMLAH	3.327,19	6.696,45	5.754,28	85,93%	72,95%

C.1. KLAIM

Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2025 adalah senilai Rp97,82 miliar atau mencapai 88,91% dari RKAP 2025 dan mengalami pertumbuhan sebesar 16,28% jika dibandingkan realisasi tahun 2024. Mayoritas klaim yang dibayarkan bersumber dari pengajuan klaim atas Penjaminan Kredit Multiguna karena risiko jiwa dan klaim lainnya disebabkan oleh debitur/terjamin melakukan wanprestasi (macet).

Berkaitan dengan pengelolaan klaim, kendala yang dihadapi Perseroan di awal tahun 2025 antara lain kesulitan mendapatkan dukungan dari Perusahaan Reasuransi dalam bentuk *treaty* maupun fakultatif dan seiring dengan peningkatan beban klaim khususnya untuk skim bisnis multiguna (non produktif) maka berpotensi menjadi retensi perusahaan.

Hal ini dikarenakan Industri Reasuransi di Indonesia sedang mengalami kondisi pasar yang sulit. Dampak dari kondisi ini menyebabkan pembayaran kewajiban klaim reasuransi (*claim recovery*) terhambat, sehingga piutang reasuransi meningkat.

C.2. SUBROGASI

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Pada Tahun 2025 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp5,75 miliar atau mencapai 85,93% dari RKAP 2025 dan mengalami kenaikan sebesar 72,95% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2025 berasal dari subrogasi atas klaim penjaminan kredit usaha menengah, kredit usaha kecil, kredit usaha mikro, kredit konstruksi, bank garansi dan kredit multiguna dengan rincian sebagai berikut :

KOMPOSISI PENDAPATAN SUBROGASI PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	SUBROGASI	REGARANSI	NETTO
KATEGORI KREDIT			
a. Produktif	7.474,65	2.967,94	4.506,72
b. Non Produktif	2.685,25	1.437,69	1.247,56
JUMLAH	10.159,90	4.405,62	5.754,28
KATEGORI PRODUK			
a. Kredit Usaha Menengah	3.656,36	1.478,90	2.177,46
b. Kredit Usaha Kecil	2.854,46	1.289,53	1.564,94
c. Kredit Usaha Mikro	419,79	118,31	301,48
d. Kredit Koperasi	-	-	-
e. Kredit Konstruksi	437,66	59,93	377,73
f. Bank Garansi	106,38	21,28	85,10
g. Surety Bond	-	-	-
h. Kredit Multiguna	2.685,25	1.437,69	1.247,56
JUMLAH	10.159,90	4.405,62	5.754,28

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkinian data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (bank dan non bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun *on the spot* ke lapangan.

3. Melakukan penagihan kepada Terjamin (debitur) secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan Terjamin (debitur) khususnya untuk kasus tertentu di mana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerja sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (bank dan non bank).
5. Bekerja sama dengan mitra penagihan subrogasi atau pihak ketiga yang memiliki berpengalaman dengan rekam jejak yang baik.
6. Mempertegas ketentuan subrogasi dalam perjanjian kerjasama penjaminan
7. Membuat perjanjian turunan/khusus penagihan piutang subrogasi dengan mitra bisnis, melakukan pemantauan secara berkala atas agunan debitur macet yang diserahkan kepada mitra bisnis hingga dilakukannya proses penjualan baik secara sukarela maupun lelang. diharapkan pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

D. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, pada posisi 31 Desember 2025 Perseroan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang termasuk Pengurus Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah SDM Realisasi 2025 dan 2024

JABATAN	2024	RKAP 2025	2025
Dewan Komisaris	1	2	2
Dewan Pengawas Syariah	2	2	2
Dewan Direksi	2	2	2
Komite Dewan Komisaris	3	3	3
Wakil Direktur	0	1	0
Kepala Divisi	3	3	3
Kepala Bagian	13	14	13
Technical Advisor		0	1
Staf	20	30	20
Karyawan Kontrak	17	15	17
JUMLAH	61	72	63

Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada perusahaan sehingga mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (performance target) yang telah ditetapkan.

Salah satu program pengembangan SDM yang dilakukan Perseroan adalah melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkaitan dengan *job description* di setiap unit kerja, seperti *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *cross functional training*, *team training*, dan *creativity training*.

Adapun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
1	Webinar Business Judgment Rules	04 Feb 2025	Sinergi Daya Prima	Agus Subrata Subarman B.
2	Sertifikasi QRGP	25 & 27 Feb 2025	STMA Trisakti & LSP MKS	Didin Supriadin
3	In House Training terkait Manajemen Risiko	18 Maret 2025	PT Jamkrida Jabar (Perseroda)	Seluruh Karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
4	Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia: Peran Strategis Bullion Bank	17 April 2025	OJK Institute	Muji Rohmad
5	Webinar “Insurance Revolution: How AI is Transforming The Underwriting Process and Optimizing Business Processes”	24 April 2025	SDM OJK	Turyono Zulpandi H. Afina Gita P.
6	Seminar “Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko : Memahami Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris”	07 Mei 2025	Visi Integritas	Agus Subrata Subarman B. Muji Rohmad
7	Webinar “Peran Strategis Industri Jasa Keuangan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah”	08 Mei 2025	OJK Institute	Muji Rohmad Irwan B. S. Catur P. W. Elok K.
8	Webinar “Efek Domino Tarif Trump: Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia”	15 Mei 2025	OJK Institute	Muji Rohmad Akhmad S.H. Afina G. P.
9	Webinar “Customer Experience : Strategies for Success in Digital Era”	22 Mei 2025	OJK Institute	Muji Rohmad Alvin N. S. Akhmad S.H. Irwan B. S.
10	Webinar “Urgensi Transparansi Keuangan Hijau pada Lembaga Jasa Keuangan”	26 Mei 2025	OJK Institute	Muji Rohmad
12	Sertifikasi QRGP	01 & 07 Juli 2025	LSP MKS	Muji Rohmad

No.	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
13	Seminar "Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko Kerugian serta Kasus Korupsi untuk Direksi dan Komisaris BUMN/D"	03 Juli 2025	Visi Integritas	Muji Rohmad
14	Pelatihan "Surety Bond dan Kontra Bank Garansi"	03-04 Juli 2025	PT Ahli asuransi Manajemen Indonesia	Alvin Noor S.
15	Webinar Strategi dan Solusi: Mengintegrasikan Contingency Plan (Rencana Darurat) dan Incident Response (Respon Insiden) untuk Meningkatkan Ketahanan Perusahaan Asuransi	10 Juli 2025	CRMS Indonesia	Noresya E. Djoko I.
16	Training Integrated Risk Management Berbasis ISO 31000	16-17 Juli 2025	PPM Manajemen	Elok K.
17	Workshop "Developing Key Risk Indicators"	30-31 Juli 2025	GRC Management	Noresya E. Djoko I.
18	Pelatihan Training of Trainer (TOT) Penjaminan Kredit	16 Agustus 2025	RGC FIA UI Bidang Penjaminan Kredit	Pamungkas
19	Company Culture Bootcamp	19-20 Agustus 2025	Aksoro Business School	Asri P. L.
20	Risk & Governance Summit 2025	19 Agustus 2025	OJK	Noresya E. Djoko I. Alvin Noor S.
21	Inhouse Training "Pengembangan Kompetensi SDM Tenaga Penjaminan Kredit dan Persiapan Ujian Sertifikasi Profesi"	21-22 Agustus 2025	RGC FIA UI Bidang Penjaminan Kredit	Seluruh Staf & Senior Staf
22	Inhouse Training "Implementasi POJK 11 tahun 2025"	12 September 2025	Penyelenggara: Jamkrida Jabar Pemateri : Herbet Salomo	Direksi, Kadiv dan Kabag dan Staf terkait
23	Inhouse Training "Workshop Penyusunan RKAP 2026 Strategic Business Planning: Menguatkan Fondasi, Membangun Keberlanjutan"	18 September 2025	Penyelenggara: Jamkrida Jabar Pemateri : Muhammad Iskandar & Maryat Nirwandi	Direksi, Kadiv dan Kabag
24	Inhouse Training "Cara Mudah dan Cepat Membaca Laporan Keuangan"	19 September 2025	Penyelenggara: Jamkrida Jabar Pemateri : Prima Yusi Sari	Direksi, Kadiv dan Kabag dan Staf terkait
25	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025	24-25 September 2025	DSN - MUI	Zaini Abdul M. Khozin Abu F.

No.	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
26	Executive Education Program - Sales Plan 2026	01-02 Oktober 2025	Markplus Institute	Kholid Anggara
27	Webinar "The Sustainable Financing Opportunities in The Indonesian Insurance Industry".	02 Oktober 2025	OJK Institute	Alvin Noor S. Zakaria Abdul Muji Rohmad Afina Gita P.
28	Surety Bond dan Kontra Bank Garansi : "Prinsip-Prinsip dan Praktik serta Prosedur dan Penanganan Klaim Surety Bond"	09-10 Oktober 2025	PT Ahli Asuransi Manajemen Indonesia	Afina Gita P Made Ayu S. Alma Hanifa C. Kholid Anggara
29	Seminar Indonesia Rendezvous Tahun 2025 "Empowering Trust Connecting The World of Insurance and Reinsurance"	15-18 Oktober 2025	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia	Bobby Cahyadi Arief Budiman
30	Webinar "Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan"	16 Oktober 2025	OJK Institute	Noresya Ezmira
31	Pelatihan "CSR Strategi Menuju GCG"	22 - 23 Oktober 2025	Yayasan Kreasi Nilai Bersama	R. Resti Restiana
32	Workshop dengan tema "Aspek Hukum dan Antisipasi Pemeriksaan oleh BPK atas Pengelolaan Keuangan Menuju WTP oleh BPK dalam Mencegah Tindak Korupsi, Metode Teknik Assessment Resiko Kecurangan bagi BUMN & BUMD dalam Pemberantasan TPPU"	23 - 24 Oktober 2025	Bintang Studi Nasional	Rian L. Dodi Panca S
33	Pelatihan "Marketing Plan 2026"	12 November 25	Marketeers Indonesia	Pamungkas H Arief Budiman Miranti Setiani Fahmi Jamiul u.
34	Pelatihan "Designing Training Program"	12 - 13 November 2025	PPM Manajemen	Asri Permata Legina
35	Seminar "Menakar Tanggung Jawab Hukum Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris & Karyawan Kunci BUMN dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan"	15 November 2025	IAI Jawa Barat	Muji Rohmad
36	Konferensi Nasional Profesional Manrisk XI "Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management As a Competitive Edge in a Complex World"	27-28 November 2025	LSPMR	Elok Khoirunnisa

No.	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
37	Exclusive Online Workshop "CEO Masterplan"	09-10 Desember 2025	Aksoro Business School	Muji Rohmad
38	Workshop "HRD Masterclass"	12-13 Desember 2025	Aksoro Business School	Muji Rohmad
39	Inhouse Training "Membangun Keberlanjutan: SDM Sehat, Tata Kelola Kuat"	19 Desember 2025		Seluruh Karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
40	Workshop "Cara Mudah Menentukan Tingkat Pencadangan Risiko Bagi Perusahaan"	22-23 Desember 2025	GRC Management	Noresya Ezmira Djoko Isdiyatno
41	Workshop "Manager Masterclass"	23-24 Desember 2025	Aksoro Business School	Subarman Basarah

E. ASPEK UMUM

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar (Perseroda) pada tahun 2025:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor:
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi:
 - a. Penertiban administrasi pengadaan barang dan jasa perusahaan.
 - b. Penertiban administrasi pengeluaran rutin rumah tangga perusahaan.
3. Menyediakan sarana prasarana dalam penunjang operasional perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola Belanja Modal Perseroan. Adapun realisasi belanja modal selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BELANJA MODAL

dalam jutaan rupiah

KATEGORI	RKAP 2025	REALISASI	%
Inventaris	1.201,60	865,34	72,02%
Kendaraan	-	-	0,00%
Gedung	677,50	191,362	28,25%
Kesisteman	1.747,50	967,72	55,38%
JUMLAH	3.626,60	2.024,42	55,82%

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 55,82% atau senilai Rp1,69 miliar dari anggaran senilai Rp2,33 miliar. Pengeluaran Belanja Modal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

F. ASPEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

Realisasi Program Kerja Bagian Sistem Manajemen Informasi (SMI) sepanjang tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Program	Uraian
1.	<i>Upgrade</i> Aplikasi Monitoring Investasi	Penambahan fitur surat pengantar investasi, perhitungan bunga, notifikasi jatuh tempo investasi, input realisasi harga dan amortisasi investasi
2.	Penambahan fitur dan pengembangan aplikasi surat dan kearsipan versi 1.1 (web dan mobile)	Penambahan fitur persetujuan dan tandatangan atasan langsung pada modul entry surat masuk dan surat keluar beserta disposisi suratnya untuk versi web dan mobile
3.	Pengembangan Aplikasi Scoring CBC v1.1K	Penambahan beberapa skema kredit, perbaikan tampilan, perbaikan rumus perhitungan scoring dan perbaikan dan edit laporan keuangan tambahan.
4.	Pengembangan aplikasi klaim, restitusi dan subrogasi	Perubahan struktur table, form input dan pelaporan - pelaporan sesuai dengan kepdir proses bisnis klaim yang baru
5.	Pengembangan aplikasi penerbitan sp untuk resiko jiwa dan resiko macet	Pengembangan aplikasi penerbitan sp untuk ijp per lima tahun, pemisahkan resiko jiwa dan resiko macet, penyesuaian format sertifikat, penyesuaian pelaporan dan rekap produksi.
6.	Pengembangan aplikasi asuransi jiwa	Pengembangan aplikasi asuransi jiwa untuk pemisahkan risiko jiwa serta penyesuaian pelaporannya sesuai dengan treaty asuransi jiwa 2025.
7.	Pengembangan Aplikasi penjaminan bersama (cogaransi), reasuransi dan fakultatif	Pengembangan Aplikasi penjaminan bersama (cogaransi), reasuransi dan fakultatif untuk risiko macet serta penyesuaian laporannya sesuai traety reass 2025
8.	Pengembangan Aplikasi Penjaminan Online dan Host to Host Ver.1.1	Pengembangan Aplikasi H2H dan penjaminan Online untuk modul import data sertifikat untuk digunakan internal, mitra broker dan agen.
9.	Host to Host KUR (BJB dan SIKP)	Penambahan Fitur H2H aplikasi penjaminan untuk program kredit KUR dengan mitra bank BJB dan H2H untuk Monitoringnya dengan SIKP

No.	Nama Program	Uraian
10.	Penambahan fitur dan Pengembangan aplikasi BsrE dan E-sertifikat	Penambahan fitur dan pengembangan BsrE dan E-sertifikat untuk mengakomodir kebutuhan aplikasi penjaminan terkait pemisahan risiko jiwa dan macet
11.	Pengembangan dan penambahan fitur penandatanganan SIP3 pada aplikasi scoring	Penambahan fitur dan penyesuaian penandatanganan pejabat pada dokumen SIP3 yang ada pada aplikasi scoring
12.	Mirroring Aplikasi Scoring Syariah	Aplikasi scoring yang sudah diterapkan di konvensional coba di terapkan di unit usaha syariah
13.	Pembuatan Aplikasi Smart Guesbook	Pembuatan aplikasi smart Guestbook untuk mencatat daftar tamu, orang yang ditemui dan keperluannya.
14.	Pengembangan aplikasi IJP 5 tahun konven	Penambahan fitur aplikasi ijp 5 tahun pada modul penerbitan SP konven
15.	Mirroring Pengembangan aplikasi IJP 5 tahunan syariah	Penambahan fitur aplikasi ijp 5 tahun pada modul penerbitan SP syariah
16.	Pembuatan aplikasi pemasaran asuransi bersama (PAB)	Pembuatan aplikasi pemasaran bersama untuk memisahkan resiko macet dan resiko jiwa sesuai POJK 11
17.	Pengembangan aplikasi Pengendalian terkait POJK 11	Penyesuaian aplikasi Asuransi jiwa, regaransi macet dan aplikasi Outstanding sesuai dengan regulasi POJK 11
18.	Pengembangan aplikasi IJP accrual	Penyesuaian perhitungan akrual pada laporan ijp akrual macet dan akrual jiwa sesuai POJK 11

G. ASPEK PENGAWASAN

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Fungsi Pengawasan Internal di Perseroan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perseroan, SPI bertugas untuk:

1. Membantu Manajemen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, sehingga Perseroan menjadi Perseroan yang efisien, profesional, dan berintegritas;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan internal terhadap kegiatan Perseroan guna terselenggaranya pengendalian Perusahaan;
3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pengendalian manajemen, keuangan, pengelolaan risiko, dan sumber daya manusia menuju terciptanya *Good Corporate Governance*;
4. Melaksanakan audit, konsultasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta daya saing Perseroan;
5. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan Auditor Eksternal dalam mewujudkan akuntabilitas perusahaan yang optimal.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern tahun 2025, SPI telah melaksanakan audit pada 3 (tiga) Divisi, sebagai berikut:

1. Audit operasional Bidang Keuangan pada Divisi Keuangan dan Umum;
2. Audit operasional Pengadaan Barang dan Jasa pada Divisi Keuangan dan Umum;
3. Audit operasional akseptasi penjaminan pada Divisi Penjaminan;
4. Audit operasional manajemen risiko dan pengendalian pada Divisi Manajemen Risiko, Klaim, dan Subrogasi.

UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) memperoleh izin pembentukan berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor: KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kelayakan dan Keputusan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah membangun Sistem Informasi Kafalah berbasis web dan layanan Kafalah Online. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, *regaransi*, dan *business recovery program*, serta saat ini dalam proses pengembangan dan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan secara bertahap dilakukan penambahan modal, saat ini Unit Usaha Syariah pada posisi 31 Desember 2025 telah memiliki Total Ekuitas sebesar Rp124,29 miliar, Total Aset sebesar Rp178,59 miliar, telah menjamin pembiayaan senilai Rp5,62 triliun dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah *Cash Basis* senilai Rp74,41 miliar, dengan jumlah KUMKM Terjamin (makful anhu) sebanyak 1.031.322 unit.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

A. ASPEK KAFALAH

VOLUME PEMBIAYAAN PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER KAFALAH	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN					
a. Produktif	3.431.164,80	8.548.042,31	7.291.532,99	85,30%	112,51%
b. Non Produktif	908.870,75	1.297.155,69	1.567.181,82	120,82%	72,43%
JUMLAH	4.340.035,55	9.845.198,00	8.858.714,81	89,98%	104,12%
KATEGORI PRODUK					
a. Pembiayaan Usaha Menengah	649.546,56	2.294.357,15	817.280,30	35,62%	25,82%
b. Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro	1.878.077,67	4.606.951,38	4.369.615,13	94,85%	132,66%
d. Pembiayaan Koperasi	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi	894.147,88	1.632.654,54	2.098.535,68	128,54%	134,70%
f. Bank Garansi	9.392,69	14.079,24	6.101,89	43,34%	-35,04%
g. Surety Bond	-	-	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna	908.870,75	1.297.155,69	1.567.181,82	120,82%	72,43%
JUMLAH	4.340.035,55	9.845.198,00	8.858.714,81	89,98%	104,12%

Volume Pembiayaan yang dijamin tahun 2025 adalah senilai Rp8,86 triliun atau terealisasi sebesar 89,98% dari RKAP 2025, di mana Volume Pembiayaan Produktif senilai Rp7,30 triliun (tercapai 85,30%) dan Non Produktif senilai Rp1,57 miliar (tercapai 120,82%). Volume Pembiayaan tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 104,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

VOLUME KAFALAH PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER KAFALAH	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN					
a. Produktif	1.912.887,43	4.656.012,77	4.313.904,21	92,65%	125,52%
b. Non Produktif	854.619,24	1.274.310,31	1.310.806,29	102,86%	53,38%
JUMLAH	2.767.506,67	5.930.323,08	5.624.710,50	94,85%	103,24%
KATEGORI PRODUK					
a. Pembiayaan Usaha Menengah	299.969,35	923.657,24	358.681,83	38,83%	19,57%
b. Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro	957.782,50	2.491.284,16	2.228.698,12	89,46%	132,69%
d. Pembiayaan Koperasi	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi	645.742,88	1.226.992,13	1.720.422,38	140,21%	166,43%
f. Bank Garansi	9.392,69	14.079,24	6.101,89	43,34%	-35,04%
g. Surety Bond	-	-	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna	854.619,24	1.274.310,31	1.310.806,29	102,86%	53,38%
JUMLAH	2.767.506,67	5.930.323,08	5.624.710,50	94,85%	103,24%

Volume Kafalah tahun 2025 adalah senilai Rp5,62 triliun atau terealisasi sebesar 94,85% dari RKAP 2025, di mana Volume Kafalah Produktif senilai Rp4,31 triliun (tercapai 92,65%) dan Non Produktif senilai Rp1,31 miliar (tercapai 102,86%). Volume Kafalah tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 103,24% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

IMBAL JASA KAFALAH CASH BASIS PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER KAFALAH	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN					
a. Produktif	21.605,41	76.172,72	41.066,36	53,91%	90,07%
b. Non Produktif	23.862,15	19.114,65	33.348,90	174,47%	39,76%
JUMLAH	45.467,55	95.287,37	74.415,26	78,10%	63,67%
KATEGORI PRODUK					
a. Pembiayaan Usaha Menengah	5.761,57	28.624,08	8.074,86	28,21%	40,15%
b. Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro	8.989,27	34.907,07	23.399,49	67,03%	160,30%
d. Pembiayaan Koperasi	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi	6.764,90	12.526,13	9.546,77	76,21%	41,12%
f. Bank Garansi	89,67	115,44	45,23	39,18%	-49,56%
g. Surety Bond	-	-	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna	23.862,15	19.114,65	33.348,90	174,47%	39,76%
JUMLAH	45.467,55	95.287,37	74.415,26	78,10%	63,67%

Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2025 adalah senilai Rp74,41 miliar atau terealisasi sebesar 78,10% dari RKAP 2025, di mana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp41 miliar (tercapai 53,91%) dan Non Produktif senilai Rp33,35 miliar (tercapai 174,47%). Pendapatan IJK *Cash Basis* tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 63,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

IMBAL JASA KAFALAH ACCRUAL BASIS (*) PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER KAFALAH	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN					
a. Produktif	21.390,77	56.268,03	33.084,12	58,80%	54,67%
b. Non Produktif	9.363,11	11.133,38	34.043,24	305,78%	263,59%
JUMLAH	30.753,89	67.401,41	67.127,36	99,59%	118,27%
KATEGORI PRODUK					
a. Pembiayaan Usaha Menengah	5.728,55	18.922,83	8.314,12	43,94%	45,13%
b. Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro	11.232,98	25.981,77	17.721,12	68,21%	57,76%
d. Pembiayaan Koperasi	-	-	-	0,00%	-100,00%
e. Pembiayaan Konstruksi	4.337,51	11.250,40	7.015,49	62,36%	61,74%
f. Bank Garansi	91,73	113,03	33,39	29,54%	-63,60%
g. Surety Bond	-	-	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna	9.363,11	11.133,38	34.043,24	305,78%	263,59%
JUMLAH	30.753,89	67.401,41	67.127,36	99,59%	118,27%

Pendapatan IJK *Accrual Basis* tahun 2025 adalah senilai Rp67,13 miliar atau terealisasi mendekati target RKAP tahun 2025 yaitu sebesar 99,59%, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp33,08 miliar (tercapai 58,80%) dan Non Produktif senilai Rp34,04 miliar (tercapai 305,78%). Pendapatan IJK *Accrual Basis* tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 118,27% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

JUMLAH KUMKM PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

JENIS TERJAMIN	2024	RKAP 2025	2025	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
KATEGORI PRODUK					
a. Pembiayaan Usaha Menengah	2.366	14.755	2.883	19,54%	21,85%
b. Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro	459.841	1.092.435	1.027.153	94,02%	123,37%
d. Pembiayaan Koperasi	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi	341	1.325	1.235	93,23%	262,17%
f. Bank Garansi	55	98	51	52,28%	-7,27%
g. Surety Bond	-	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH	462.603	1.108.613	1.031.322	93,03%	122,94%

Jumlah KUMKM Terjamin (*Makful Anhu*) tahun 2025 adalah sebanyak 1.031.322 unit atau terealisasi sebesar 93,03% dari RKAP 2025. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 122,94% jika dibandingkan tahun 2024.

B. ASPEK KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	49.858,45	73.721,09	66.497,22	90,20%	33,37%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(66,00)	(519,74)	(226,64)	43,61%	343,40%
Surat Berharga	22.741,79	42.991,30	64.860,62	150,87%	185,20%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	(25,60)	-	0,00%	0,00%
Piutang Re/Cogaransi	5.831,18	25.111,42	18.231,60	72,60%	212,66%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(354,15)	(2.749,41)	(614,24)	22,34%	173,44%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	419,83	1.168,90	807,12	69,05%	
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	0,23	(4,54)	-1973,16%	0,00%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	6.496,48	8.460,21	6.142,93	72,61%	-5,44%
Piutang Lain-Lain	14.422,04	22.872,30	8.735,53	38,19%	-39,43%
Properti Investasi	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH ASET LANCAR	99.349,62	171.030,71	164.429,62	96,14%	65,51%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	10.223,54	10.028,29	11.227,61	111,96%	9,82%
Aset Tetap - Bersih	1.888,22	2.057,01	1.870,79	90,95%	-0,92%
Aset Pajak Tangguhan	1.035,17	-	1.034,43	0,00%	-0,07%
Aset Lain-Lain	8,25	472,69	27,42	5,80%	232,32%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	13.155,18	12.557,99	14.160,25	112,76%	7,64%
JUMLAH ASET	112.504,80	183.588,70	178.589,87	97,28%	58,74%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	14,74	757,54	74,23	9,80%	403,58%
Utang Re/Cogaransi	1.608,35	5.920,50	2.405,46	40,63%	49,56%
Utang Klaim	-	-	-	0,00%	-100,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar	71,91	57,53	346,04	601,45%	381,21%
Penampungan Sementara	4.332,55	4.411,19	5.468,54	123,97%	26,22%
Utang Lancar Lainnya	940,17	716,41	1.723,49	240,57%	83,32%
Pendapatan Diterima Dimuka	14.375,91	19.380,74	15.238,33	78,63%	6,00%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.343,63	31.243,92	25.256,08	80,84%	18,33%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	20.962,58	29.414,56	26.710,86	90,81%	27,42%
Cadangan Klaim	1.564,10	6.084,69	2.325,42	38,22%	48,67%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	22.526,68	35.499,25	29.036,27	81,79%	28,90%
JUMLAH LIABILITAS	43.870,31	66.743,16	54.292,36	81,35%	23,76%
EKUITAS					
Modal	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Cadangan Umum	10.264,97	12.202,75	13.164,45	107,88%	28,25%
Saldo Laba	8.284,23	3.748,98	10.588,45	282,44%	27,81%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	85,28	893,80	544,60	60,93%	538,58%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH EKUITAS	68.634,48	116.845,54	124.297,51	106,38%	81,10%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	112.504,80	183.588,70	178.589,87	97,28%	58,74%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 (AUDITED)	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT	% GROWTH
PENDAPATAN KAFALAH					
Imbal Jasa Kafalah	31.160,99	68.148,42	67.717,57	99,37%	117,32%
Beban Akuisisi	(4.585,58)	(7.343,48)	(8.536,24)	116,24%	86,15%
Restitusi IJK	(407,11)	(258,85)	(590,21)	228,01%	44,98%
Manajemen Fee	861,28	2.229,83	2.654,18	119,03%	208,17%
Beban Regaransi	(5.205,23)	(17.519,02)	(22.911,43)	130,78%	340,16%
JUMLAH PENDAPATAN KAFALAH	21.824,36	45.256,91	38.333,86	84,70%	75,65%
KLAIM					
Beban Klaim	(13.662,79)	(25.492,62)	(27.931,97)	109,57%	104,44%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	(375,76)	(3.116,88)	(380,49)	12,21%	1,26%
JUMLAH KLAIM	(14.038,55)	(28.609,50)	(28.312,46)	98,96%	101,68%
PENDAPATAN KAFALAH BERSIH	7.785,82	16.647,41	10.021,40	60,20%	28,71%
PENDAPATAN INVESTASI	4.045,05	4.171,92	5.238,74	125,57%	29,51%
PENDAPATAN SUBROGASI	606,58	1.636,13	1.548,31	94,63%	155,25%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(341,11)	(2.546,08)	(1.245,70)	48,93%	265,19%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(1.305,89)	(2.066,42)	(1.042,83)	50,47%	-20,14%
Beban Sumber Daya Manusia	(1.894,67)	(9.136,92)	(2.718,28)	29,75%	43,47%
Beban Administrasi & Umum	(666,54)	(3.413,00)	(1.293,51)	37,90%	94,06%
JUMLAH BEBAN USAHA	(3.867,10)	(14.616,34)	(5.054,62)	34,58%	30,71%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	8.229,25	5.293,04	10.508,14	198,53%	27,69%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	80,32	0,00%	0,00%
Manfaat Pajak Tangguhan	54,98	(1.544,06)	-	0,00%	0,00%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	54,98	(1.544,06)	80,32	-5,20%	146,08%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	8.284,23	3.748,98	10.588,45	282,44%	27,81%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(6,12)	-	459,32	0,00%	-7608,84%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	8.278,11	3.748,98	11.047,77	294,69%	33,46%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Komprehensif Lain di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Laba Bersih Tahun Berjalan UUS tahun 2025 adalah senilai Rp10,59 miliar atau terealisasi sebesar 282,44% dari RKAP 2025 dan mengalami pertumbuhan sebesar 27,81% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
- Total Aset UUS tahun 2025 adalah senilai Rp164,42 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 65,51% dibandingkan realisasi tahun 2024 senilai Rp99,35 miliar.

-
- Pendapatan Investasi UUS tahun 2025 adalah senilai Rp5,23 miliar atau terealisasi sebesar 125,27% dari RKAP 2025 dan mengalami pertumbuhan sebesar 29,51% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
 - Beban Klaim UUS tahun 2025 adalah senilai Rp27,93 miliar atau terealisasi sebesar 109,57% dari RKAP 2025 dan mengalami pertumbuhan sebesar 104,44% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.
 - Beban Usaha UUS tahun 2025 adalah senilai Rp5,05 miliar atau terealisasi sebesar 34,58% dari RKAP 2025 dan mengalami penurunan sebesar 30,7% jika dibandingkan realisasi tahun 2024.

TATA KELOLA PERUSAHAAN



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu *"menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.
3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

PT Jamkrida Jabar menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 diselenggarakan pada tanggal 05 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk beban Bonus dan Tantiem didalamnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomor 00083/2.1000/AU.1/08/1290-5/1/IV/2025 tanggal 14-05-2025 dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material.

Selanjutnya Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Agenda Ketiga

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

4. Keputusan Agenda Keempat

- a. Pemegang Saham menyetujui Perubahan Struktur Organisasi dan tata Kelola (SOTK) Perseroan
- b. Pemegang Saham menetapkan perubahan kepengurusan yaitu:
 - Menetapkan memberhentikan dengan hormat Taufiek Dharviandi sebagai Direktur Operasional dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama serta Agus Subrata selaku Direktur Keuangan;
 - Menetapkan dan mengangkat Bobby Cahyadi sebagai Direktur Utama dan Muji Rohmad sebagai Direktur Keuangan dengan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - Pemegang Saham menetapkan Muhammad Iskandar selaku Komisaris Utama Independen sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sampai dengan salah satu Direksi yang diangkat dalam RUPS dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jamkrida Jabar (Perseroda) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tandy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025.

Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 74 tanggal 21 November 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tandy Suwarman, S. yang memuat bahwa Direksi telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) OJK sebagai berikut:

1. Bobby Cahyadi sebagai Direktur Utama dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-93/KO.12/2025 tanggal 04 September 2025;
2. Muji Rohmad sebagai Direktur Keuangan dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-114/KO.12/2025 tanggal 04 November 2025.

Sehingga pada akhir tahun 2025, susunan Pengurus PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menjadi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama Independen	Muhammad Iskandar
2	Komisaris	Yogi Gautama Jaelani
3	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Zaini Abdul Malik
4	Dewan Pengawas Syariah	Khozin Abu Faqih
5	Direktur Utama	Bobby Cahyadi
6	Direktur Keuangan	Muji Rohmad

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2026.
2. Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui usulan Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Garce, Karunawan untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 83 tanggal 24 November 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tandy Suwarnan, S.H.

KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan <i>Position</i>	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Agus Subrata	Direktur Keuangan	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.: KEP-432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan Tgl.05-06- 2025	Indonesia	Indonesia
2	Taufiek Dharviandi	Direktur Operasional dan Ptt. Direktur Operasional	20-11-2023 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-198/PD.02/2023	Akta RUPS LB No. 02 Tgl.10-10-2023 Masa Jabatan Tgl.05-06- 2025	Indonesia	Indonesia
3	Muhammad Iskandar	Ptt. Direktur Utama	-	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025 Masa jabatan Berakhir sampai dengan salah satu Direksi yang diangkat dinyatakan lulus Fit and Proper Test OJK	Indonesia	Indonesia
4	Bobby Cahyadi	Direktur Utama	04-09-2025 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-93/KO.12/2025	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025 Masa jabatan 5 Tahun	Indonesia	Indonesia
5	Muji Rohmad	Direktur Keuangan	04-11-2025 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-114/KO.12/2025	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025 Masa Jabatan 5 Tahun	Indonesia	Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 - d. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - e. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”.

Selama tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak rapat sekurang-kutrangnya 1 kali dalam sebulan dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Kehadiran	
1	Agus Subrata	9	Direktur Keuangan Sampai dengan 5 Juni 2025
2	Taufiek Dharviandi	11	Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Sampai dengan 5 Juni 2025
3	Muhammad Iskandar	7	Pelaksana Tugas Direktur Utama Mulai 5 Juni sampai dengan 3 September 2025
4	Bobby Cahyadi	4	Direktur Utama Mulai 4 September 2025
5	Muji Rohmad	2	Direktur Keuangan Mulai 4 November 2025

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Muhammad Iskandar	Komisaris Utama Independen	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-53/KO.12/2025 Tgl.27-03-2025 Melanjutkan masa jabatan sebelumnya (Komisaris Independen)	Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Masa Jabatan 4 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Yogi Gautama Jaelani	Komisaris	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-195/PD.02/2024 Tgl.03-05-2024 Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Definitif setelah dinyatakan lulus (Fit & Proper Test) OJK	Akta No. 39 Tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 Tahun	Indonesia	Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana

kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (Dua puluh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
1	Muhammad Iskandar	20	100%	
2	Yogi Gautama Jaelani	15	100%	Efektif 27 Maret 2025

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
2	Khozim Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Zaini Abdul Malik	4	100%
2	Khozin Abu Faqih	4	100%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0011/DEKOM/JJ/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit, menetapkan susunan Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagai berikut:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit.
 - 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit. Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;

- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	4	100%
2	Prima Yusi Sari	4	100%

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2025	Terlaksana
2	Pemantauan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI Triwulanan	Terlaksana
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan	Terlaksana
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2026	Terlaksana

No.	Program Kerja	Realisasi
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal	Terlaksana
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2024	Terlaksana
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 oleh KA	Terlaksana
8	Mengulas RKAP 2026	Terlaksana
9	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2025	Terlaksana
10	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2025	
11	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan	Terlaksana
12	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain	Terlaksana

PROFIL KOMITE AUDIT

MUHAMMAD ISKANDAR

Ketua Komite Audit

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



PRIMA YUSI SARI

Anggota Komite Audit

Tempat dan Tanggal Lahir

Palembang, 24 Agustus 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2023
- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran mulai tahun 1999 sampai dengan saat ini.
- Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat, mulai Oktober tahun 2023 sampai dengan saat ini.

2. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Kepala Divisi Keuangan dan Umum (*ex Officio*) sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki di bidang ilmu manajemen.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Nama	Jumlah Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	3
2	Wa Ode Zusnita Muizu	3
3	Kepala Divisi Keuangan & Umum (Ex-Officio)	3

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan Review terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Terlaksana
2	Melakukan Evaluasi terhadap Proses Rekrutmen Perusahaan	Terlaksana
3	Melakukan Evaluasi terhadap Pengelolaan SDM dan Kaderisasi Kepemimpinan	Terlaksana
4	Review Pelatihan Berkelanjutan Untuk Pengembangan Kompetensi SDM	Terlaksana
5	Melakukan Evaluasi Tahunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi	Terlaksana

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MUHAMMAD ISKANDAR

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Tempat dan Tanggal Lahir

Kendari, Oktober 1977

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008
- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran



SUBARMAN BASARAH

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Ex-Officio)

Tempat dan Tanggal Lahir

Surabaya, Juni 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak menjabat sebagai Kepala Divisi yang membawahi bidang SDM mulai November 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Satuan Pengawas Internal PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai Juni 2024 sampai dengan Oktober 2025.
- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai Maret 2022 sampai dengan April 2024.
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo mulai Juli 2018 sampai dengan Januari 2022.
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo mulai Juli 2018 sampai dengan Januari 2022.
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda mulai Maret 2013 sampai dengan September 2017.
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia mulai Maret 2013 sampai dengan Februari 2014.

3. KOMITE PEMANTAU RISIKO

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Persero) Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Persero) sebagai berikut:
 - 1) Yogi Gautama Jaelani (Komisaris) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko.
 - 2) Dini Wahjoe Hapsari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
 - 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
 - 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
 - 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;
 - 5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;
 - 6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;
 - 8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;
 - 9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;
 - 10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
 - 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi

- 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Nama	Jumlah Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	2
2	Yogi Gautama Jaelani	3
3	Dini Wahjoe Hapsari	4

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	Terlaksana
2	Melakukan Evaluasi Profil Risiko secara berkala	Terlaksana
3	Pendampingan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan	Terlaksana
4	Mengawasi Kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan regulator	Terlaksana
5	Mengawasi proses Self Assessment GCG yang dilakukan oleh perusahaan	Terlaksana

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

YOGI GAUTAMA JAELANI

Ketua Komite Pemantau Risiko

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



DINI WAHJOE HAPSARI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Tempat dan Tanggal Lahir

Probolinggo, Januari 1972

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Doktor Ilmu Akuntansi (DIA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
- S2 Magister Sains Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
- 1 Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai tahun 2024 sampai dengan saat ini.
- Dosen dan Peneliti Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Telkom sampai dengan saat ini.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;
3. Komite Klaim; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

2. Komite Penjaminan

Ketentuan mengenai Komite Penjaminan dengan mengacu pada perubahan SOTK adalah Keputusan Direksi Nomor: KEP-0004/DIR/JJ/I/2026 tentang Kewenangan Memutus Komite Penjaminan dan Klaim, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kewenangan	Anggota Komite	Nilai	Penandatanganan Sertifikat Penjaminan
1	Komite Penjaminan Level 1	Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah Kepala Bagian Manajemen Risiko	≤ Rp 750 juta	Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah
2	Komite Penjaminan Level 2	Kepala Divisi Penjaminan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan	Rp 750 juta < X ≤Rp 10 miliar	Kepala Divisi Teknik
3	Komite Penjaminan Level 3	Direktur Utama Kepala Divisi Penjaminan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan	> Rp10 miliar	Kepala Divisi Teknik

3. Komite Klaim

Ketentuan mengenai Komite Penjaminan terbaru dengan mengacu pada perubahan SOTK adalah adalah Keputusan Direksi Nomor: KEP-0004/DIR/JJI/2026 tentang Kewenangan Memutus Komite Penjaminan dan Klaim, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kewenangan	Anggota Komite	Nilai	Penandatanganan Berita Acara Komite Klaim
1	Komite Klaim Level 1	- Kepala Bagian Klaim - Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah - Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi & Investasi	≤ Rp 100 juta	Kepala Bagian Klaim
2	Komite Klaim Level 2	- Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	Rp 100 juta < X ≤ Rp 1 miliar	Kepala Divisi Teknik
3	Komite Klaim Level 3	- Direktur Keuangan - Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	Rp 1 miliar < X ≤ Rp 5 miliar	Direktur Keuangan atau Kepala Divisi Manajemen Risiko, Klaim & Subrogasi dan Kepala Divisi Teknik (mewakili Direksi)
4	Komite Klaim Level 4	- Direktur Utama - Direktur Keuangan - Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	> Rp 5 miliar	Direktur Utama atau Kepala Divisi Manajemen Risiko, Klaim & Subrogasi dan Kepala Divisi Teknik (mewakili Direksi)

4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan

Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:

- a. Direksi;
- b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

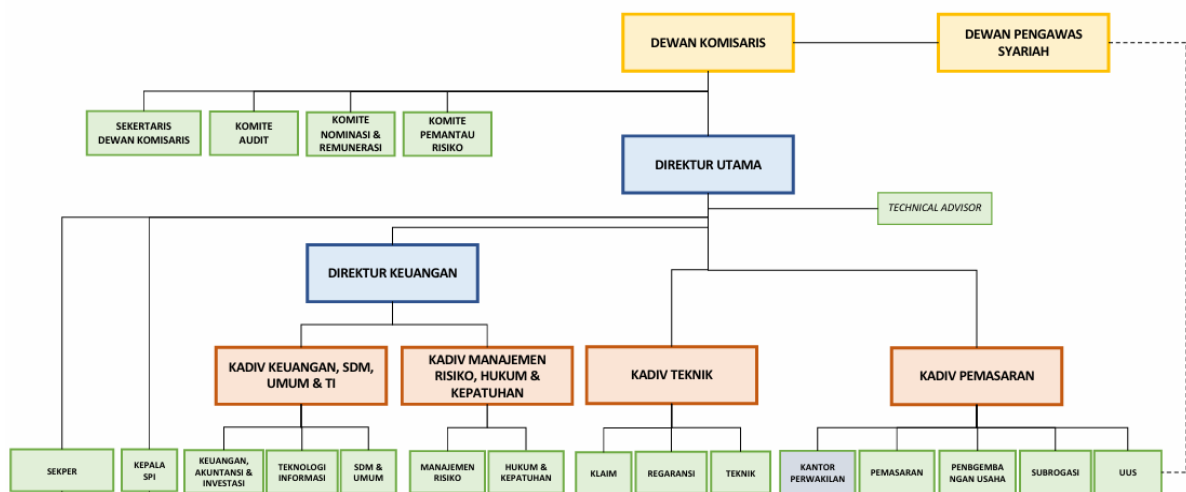
- 1) maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
 - 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.
5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
 - b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - 3) Memberikan keputusan penjaminan;
 - 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
 - c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - 3) Memberikan keputusan klaim;
 - 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
 - d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a. Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
 - b. Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
 - c. Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d. Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.

- 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan nomor KEP-0037/DIR/JJ/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Struktur Organisasi, bahwa fungsi kepatuhan telah ditetapkan dalam satu bagian tersendiri pada struktur organisasi perusahaan sebagaimana berikut:



- a. Satuan kerja atau pegawai yang melakukan monitoring terhadap fungsi kepatuhan dijabat oleh Kepala Bagian dibawah Divisi Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan.
- b. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - 1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:
Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industry serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petugas Kepatuhan)

Tugas dan Kewenangan

 - a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
 - b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
 - c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d) Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.

- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.
- c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.
- d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.
- f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.
- h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, gearing ratio, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

Hasil Penilaian Secara Mandiri

TAHUN	NILAI	PREDIKAT
2024	91,99	Sangat Baik
2025	86,79	Sangat Baik

Ketentuan Penilaian

NILAI	PERINGKAT	PREDIKAT
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

2. FUNGSI AUDITOR INNTERNAL (SPI)

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
 - 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
 - 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (fraud).
 - 4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing- masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.
- b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
 - 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
 - 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
- c. Independensi auditor internal
 - 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya;
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.

- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.
- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
 - a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saransaran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
 - 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
 - 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
 - 5) Memberikan peni lain tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
 - 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
 - 7) Mengidentifikasi kegiatankegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
 - 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
 - 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
 - 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).

- e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI
Perusahaan belum memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI yang definitif di tahun 2025.
- f. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI
Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar saat ini berjumlah 1(satu) orang terdiri dari staf SPI.
- g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal
Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

3. FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

Efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan, komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif. Selain itu, Direksi juga mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b) Penunjukan AP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 7 (tujuh) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c) Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d) Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.
- e) AP yang ditunjuk telah melaksanakan:
 - 1) Penyampaian hasil audit dan management letter kepada Perseroan tepat waktu.

- 2) Kemampuan bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) selama 7 (tujuh) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK	Biaya Auditor Eksternal
2025	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Hertanto AP. 0136	185 juta
2024	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	177 juta
2023	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang

dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* serta evaluasi.

4. Struktur organisasi sistem informasi Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi.
 - b. Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi.
5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.
6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura.
Pada tahun 2025 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.
 - b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non tunai.
Pada tahun 2025 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu tunjangan transportasi dan asuransi kesehatan.
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.
Pada tahun 2025, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.
 - b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 2025



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan Dana CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Dana CSR diambil dari keuntungan Perseroan yang disisihkan setiap tahunnya.

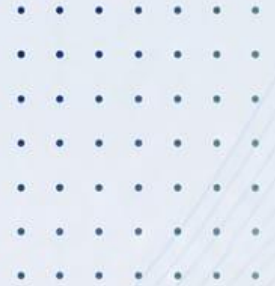
Adapun capaian dan pertumbuhan Realisasi Dana CSR Tahun 2025 terhadap Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi 2024	Anggaran 2025 (*)	Realisasi 2025	% Achievement	% Growth
600.460.000	2.125.065.601	210.587.600	9,91%	-64,93%

*) Total Anggaran CSR Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.125.065.601,- bersumber dari:

1. Sisa Anggaran CSR yang belum digunakan sebesar Rp872.498.654,-;
2. Anggaran CSR sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp502.566.947,-; dan
3. Anggaran Beban CSR dalam RKAP 2025 sebesar Rp750.000.000,-.

LAPORAN AUDIT 2025





PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

2025 Audit Report

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen

terdaftar dan diawasi oleh
 OTORITAS
JASA
KEUANGAN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bobby Cahyadi
Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Muji Rohmad
Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 27 APR 2026

Direktur Utama

Direktur Keuangan

Bobby Cahyadi

Muji Rohmad



**PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Halaman

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1 – 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 – 4
Laporan Perubahan Ekuitas	5 – 6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 – 43

No. 00044/2.1000/AU.1/08/0136-1/1/IV/2026

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jamkrida Jabar (Perseroda)**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar,

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap indenpendensi kami, dan, djika relevan langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto., M.S.Ak., CPA., CPMA., CA.
Register Akuntan Publik No. 0136
Jakarta, 27 April 2026

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	181.636.944.344	157.059.286.771
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(425.836.322)	(193.024.630)
Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 9	168.806.462.467	109.766.716.333
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		-	-
Piutang Re/Cogaransi *)	2e, 5	164.102.537.589	186.042.383.004
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(6.664.014.028)	(6.982.180.896)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	9.393.276.449	10.178.553.632
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(48.669.813)	(194.520.790)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	32.884.676.663	31.966.617.302
Piutang Lain-lain	7	3.931.884.992	685.310.492
Properti Investasi	10	2.580.304.000	2.626.966.820
Jumlah Aset Lancar		556.197.566.341	490.956.108.038
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	84.737.435.997	105.100.754.270
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	12.528.136.185	12.562.548.399
Aset Pajak Tanggahan	2o, 22c	5.236.801.635	5.937.964.264
Piutang Estimasi *)	12	14.977.022.728	14.527.966.204
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 13	1.467.632.120	971.263.828
Jumlah Aset Tidak Lancar		118.947.028.665	139.100.496.965
JUMLAH ASET		675.144.595.006	630.056.605.003

*) Reklasifikasi (Catatan 33)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	2o, 22a	2.506.375.148	408.842.145
Utang Klaim	14	1.411.645.358	--
Utang Re/Cogaransi	15	41.720.442.109	43.362.797.578
Beban yang Masih Harus Dibayar	16	7.976.722.643	4.955.709.177
Penampungan Sementara *)	17	14.142.276.494	11.862.544.111
Utang Lancar Lainnya *)	18	108.859.337	23.917.085
Liabilitas Penjaminan Lainnya *)	19	15.622.367.066	2.674.623.806
Pendapatan Diterima Dimuka	20a	62.083.815.744	57.870.926.630
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		145.572.505.899	121.159.360.532
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	20b	163.681.476.583	158.313.200.984
Cadangan Klaim	2r, 21	27.359.171.072	25.435.086.092
Imbalan Pasca Kerja	2n, 23	3.273.318.147	3.195.682.877
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		194.313.965.802	186.943.969.953
JUMLAH LIABILITAS		339.886.471.701	308.103.330.485
EKUITAS			
Modal			
Modal dasar sebesar dari 104.112 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebanyak 26.028 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.	24	260.280.000.000	260.280.000.000
Cadangan Umum	24	57.268.005.688	53.750.037.073
Saldo Laba	24	15.356.812.034	10.051.338.903
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Keuntungan pengukuran kembali	2d, 3, 9	2.873.586.085	(1.667.521.367)
Selisih Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	2n, 23	(520.280.502)	(460.580.071)
JUMLAH EKUITAS		335.258.123.305	321.953.274.518
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		675.144.595.006	630.056.605.003

*) Reklasifikasi (Catatan 33)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa			
Penjaminan / Kafalah	2p, 25	342.505.531.623	245.378.145.743
Beban Akuisisi	2p, 25	(34.928.487.857)	(33.634.656.664)
Restitusi IJP	2p, 25	(2.593.408.471)	(5.276.929.256)
Management Fee	2p, 25	33.544.839.827	27.182.429.607
Beban Regaransi	2p, 25	(210.900.676.430)	(129.789.678.614)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		127.627.798.692	103.859.310.816
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 27	(217.441.974.263)	(193.744.911.751)
Klaim Reasuransi	2t, 27	119.622.253.236	109.620.660.926
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2t, 27	(1.475.028.456)	(2.802.855.569)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(99.294.749.483)	(86.927.106.394)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		28.333.049.209	16.932.204.422
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 2j, 26	20.038.006.472	16.162.894.889
PENDAPATAN SUBROGASI	2r, 29	5.754.278.882	3.327.192.954
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA	30	71.816.471	6.902.076.804
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	28	(5.032.647.828)	(6.776.871.625)
Beban Sumber Daya Manusia	28	(24.537.555.606)	(20.972.850.815)
Beban Administrasi dan Umum	28	(7.670.123.458)	(7.470.821.976)
JUMLAH BEBAN USAHA		(37.240.326.892)	(35.220.544.416)
LABA SEBELUM PAJAK		16.956.824.142	8.103.824.653
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2o, 22b	(1.683.382.800)	-
Manfaat Pajak Tangguhan	2d, 22c	83.370.692	1.947.514.250
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1.600.012.108)	1.947.514.250
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		15.356.812.034	10.051.338.903

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	23	(76.539.014)	(227.633.994)
Pajak Tanggahan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	22 c	16.838.583	50.079.478
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif	9	5.342.479.376	(1.988.670.509)
Pajak Tanggahan Terkait Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif	22 c	(801.371.905)	298.300.576
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.481.407.040	(1.867.924.449)
LABA KOMPREHENSIF		19.838.219.074	8.183.414.454

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2024		260.280.000.000	53.750.037.073	(1.667.521.387)	(460.580.071)	10.051.338.903	321.953.274.518
Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	24	-	3.517.968.615	-	-	(3.517.968.615)	-
Pembagian Dividen	24	-	-	-	-	(6.030.803.342)	(6.030.803.342)
Bonus dan Tantiem	24	-	-	-	-	-	-
CSR	24	-	-	-	-	(502.566.946)	(502.566.946)
Laba Tahun Berjalan	24	-	-	-	-	15.356.812.034	15.356.812.034
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3, 9	-	-	4.541.107.472	-	-	4.541.107.472
Penghasilan komprehensif lain imbalan pasca kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 23	-	-	-	(59.700.431)	-	(59.700.431)
Saldo per 31 Desember 2025		260.280.000.000	57.268.005.688	2.873.586.085	(520.280.502)	15.356.812.035	335.258.123.305

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Halaman - 5

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023		260.280.000.000	50.195.706.826	22.848.546	(283.025.555)	10.155.229.276	320.370.759.093
Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	24	-	3.554.330.247	-	-	(3.554.330.247)	-
Pembagian Dividen	24	-	-	-	-	(5.585.376.102)	(5.585.376.102)
Bonus dan Tantiem	24	-	-	-	-	-	-
CSR	24	-	-	-	-	(1.015.522.926)	(1.015.522.926)
Laba Tahun Berjalan	24	-	-	-	-	10.051.338.903	10.051.338.903
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3, 9	-	-	(1.690.369.933)	-	-	(1.690.369.933)
Penghasilan komprehensif lain imbalan pasca kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 23	-	-	-	(177.554.516)	-	(177.554.516)
Saldo per 31 Desember 2024		260.280.000.000	53.750.037.073	(1.667.521.387)	(460.580.071)	10.051.338.903	321.953.274.518

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Halaman - 6

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		409.015.948.400	220.464.424.945
Pembayaran Klaim		(216.030.328.905)	(193.744.911.751)
Penerimaan Re/Cogaransi		119.622.253.236	109.620.660.926
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(237.394.357.381)	(241.759.483.341)
Pembayaran kepada Karyawan		(25.039.026.296)	(20.462.112.380)
Pembayaran Pajak		(932.068.473)	(3.424.027.710)
Pendapatan Subrogasi		5.754.278.880	3.327.192.952
Utang Lancar Lainnya		13.032.685.512	2.581.778.530
(Pembayaran) Penerimaan Lain - Lain		(111.112.997)	7.270.918.062
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS OPERASI		67.918.271.976	(116.125.559.767)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(64.499.485.046)	(10.460.000.000)
Penjualan Aset Keuangan		12.315.832.743	47.144.313.420
Pendapatan Investasi		16.898.262.262	14.868.949.593
Pengeluaran Untuk			
Pengadaan Aset Tetap		(1.056.701.020)	(976.963.868)
Pengadaan Aset Lain lain		(967.720.000)	(22.263.501)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		(37.309.811.061)	50.554.035.644
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan Modal Disetor			
Pembagian Dividen		(6.030.803.342)	(5.585.376.102)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		(6.030.803.342)	(5.585.376.102)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		24.577.657.573	(71.156.900.225)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		157.059.286.771	228.216.186.996
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2d, 4	181.636.944.344	157.059.286.771
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas	2d, 4	34.173.227	37.473.789
Giro Bank	2d, 4	15.757.088.240	10.449.485.151
Deposito	2d, 4	165.845.682.877	146.572.327.831
Jumlah Kas dan Setara Kas	2d, 4	181.636.944.344	157.059.286.771

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumer.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.
- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumer.
- PT Adonal Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonal Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (Cash Loans & Non Cash Loan)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Igna Asia Reinsurance Brokers perihal Jasa Keperantaraan Pertanggungjanaan Ulang (Reasuransi) Untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Jabar sebagai pengganti dari PT Best One Asia Reinsurance Brokers. Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Portofolio Penjaminan Ulang PT Jamkrida Jabar, tanggal 11 Mei 2023 dan 10 maret 2023 peralihan portofolio tersebut sudah diketahui oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) dan PT Reasuransi Syariah Indonesia sebagai pihak penjaminan ulang.

**PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

35. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 27 April 2026.